



BADAN POM

LAPORAN **KINERJA**

Interim Triwulan IV
2021

BALAI POM DI MAMUJU



Jalan Poros Mamuju-Kalukku KM. 13,
Bambu, Sulawesi Barat



(0426) 2322759



bpom_mamuju@pom.go.id

KATA PENGANTAR

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju dapat menyelesaikan tugas-tugas selama Triwulan IV Tahun 2021 dengan baik dan tepat waktu yang diwujudkan dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Tahun 2021.

Penyusunan Laporan Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja *input*, *output*, dan *outcome*, yang telah ditetapkan dan direalisasikan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh realisasi kinerja dan pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja oleh Balai POM di Mamuju dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada Tahun 2021. Selama 12 (dua belas) Bulan Balai POM di Mamuju telah menjalankan tugas pokok dan fungsi melalui berbagai kegiatan di dalam upaya memenuhi Visi "*Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong*".

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Tahun 2021, diharapkan akan memberikan informasi atas kinerja yang telah tercapai dan menjadi dasar dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Mamuju, 19 Januari 2022
Kepala Balai POM di Mamuju,



i Lintang Purba Jaya, S.Farm., Apt.,M.Si



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
<i>1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI</i>	2
<i>1.2. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI</i>	3
<i>1.3. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS</i>	5
<i>1.4. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA</i>	7
<i>1.5. STRUKTUR ORGANISASI</i>	10
BAB III PERENCANAAN KINERJA	13
<i>2.1. RENCANA STRATEGIS</i>	14
<i>2.2. BUDAYA ORGANISASI</i>	23
<i>2.3. TUJUAN</i>	24
<i>2.4. SASARAN STRATEGIS</i>	24
<i>2.5. RENCANA KERJA TAHUNAN</i>	38
<i>2.6. PERJANJIAN KINERJA</i>	43
<i>2.7. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)</i>	49
<i>2.8. KERANGKA PENDANAAN</i>	54
<i>2.9. METODE PENGUKURAN</i>	61
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	64
<i>3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI</i>	65
<i>3.2. REALISASI ANGGARAN</i>	138
BAB IV PENUTUP	150
<i>4.1. KESIMPULAN</i>	150
<i>4.2. SARAN</i>	151
LAMPIRAN	163

IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas kinerja pada hakekatnya merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan visi dan misi organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang menjabarkan Visi dan Misi organisasi ke dalam tujuan dan sasaran strategis/program/kegiatan Balai POM di Mamuju. Tujuan dan sasaran ini dapat dicapai dengan melaksanakan suatu kerja yang dinyatakan dalam berbagai kegiatan. Anggaran diperlukan sebagai input kegiatan untuk merealisasikan kegiatan tersebut. Balai POM di Mamuju mendapatkan total anggaran DIPA Revisi Anggaran Triwulan IV sebesar Rp19,269,583,000 dengan Realisasi Anggaran Triwulan IV tahun 2021 sebesar Rp19,262,178,083.00 atau 99.96%.

Adanya pandemi Covid-19 yang masih berlangsung dan Gempa Bumi di Sulawesi Barat tanggal 15 Januari 2021 yang berdampak pada kerusakan talud dan 3 (tiga) gedung laboratorium Balai POM di Mamuju tidak menurunkan semangat Balai POM di Mamuju untuk mencapai kinerja yang optimal. Peristiwa tersebut diubah menjadi sebuah kekuatan agar Balai POM di Mamuju semakin kompak dan semangat dalam berbagi untuk saudara-saudara dan masyarakat yang terdampak gempa dan membutuhkan bantuan.

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 Balai POM di Mamuju telah berhasil mencapai Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Total sebesar 102.34% dengan kriteria BAIK. Selain itu ada 8 (delapan) Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan dengan kriteria BAIK yaitu:

- SK1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
 - SK2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
 - SK4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
 - SK5 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
 - SK6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
 - SK8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal
 - SK9 Terwujudnya SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja optimal
 - SK11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel
- Hal ini menunjukkan keberhasilan Balai POM di Mamuju dalam melakukan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju namun belum optimal. Hal ini selaras dengan misi Balai POM di Mamuju yaitu:
- Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
 - Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna

perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.

- Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Balai POM di Mamuju senantiasa berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja di Tahun mendatang sehingga dapat tercipta manajemen kinerja yang berorientasi hasil. Keberhasilan yang diperoleh ini tentu tidak terlepas dari komitmen dan dukungan seluruh pegawai di Lingkungan Balai POM di Mamuju yang telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target kinerja, diantaranya:

1. Budaya Kerjasama tim yang tercipta di Balai POM di Mamuju, sehingga dalam mencapai target dapat dilaksanakan seoptimal mungkin oleh semua kelompok substansi
2. Sebagian besar ASN milenial yang responsif dan cepat beradaptasi terhadap perubahan
3. Sistem Pengawasan berbasis risiko yang dilaksanakan secara profesional dan kredibel oleh Balai POM di Mamuju untuk melindungi masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat
4. Balai POM di Mamuju senantiasa meningkatkan pemahaman konsumen dan produsen atau distributor Obat dan Makanan melalui penyampaian informasi secara langsung maupun melalui sosial media
5. SDM Balai POM di Mamuju dalam melaksanakan tugasnya dengan penuh integritas dan professional dan selalu berusaha menghindari konflik kepentingan maupun gratifikasi yang mungkin terjadi pada saat melaksanakan tugas dan fungsinya
6. Koordinasi dan hubungan kerja sama dengan lintas sektor yang baik

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pada pasal 3 disebutkan bahwa Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan Prinsip-Prinsip Partisipasi, Penegakan Hukum, Transparansi, Kesetaraan, Daya Tanggap, Wawasan Kedepan, Akuntabilitas, Pengawasan, Efisiensi dan Efektifitas serta Profesionalisme. Hal ini menunjukkan tekad Bangsa Indonesia untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*. Sebagai tindak lanjut dari UU tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja (LAPKIN) merupakan instrument pertanggungjawaban yang akurat dan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. LAPKIN merupakan hasil integrasi dan sinergi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain di dalam suatu Instansi Pemerintah, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan di lingkungan masyarakat yang dinamis, baik di tingkat nasional maupun global. Dalam LAPKIN, dilaporkan berbagai hasil dari pelaksanaan program kegiatan yang telah disusun dan dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja), dimana kegiatan-kegiatan tersebut merupakan hasil penelitian dan pengamatan kondisi nyata yang terdapat di masyarakat.

Laporan Kinerja Interim Triwulan IV disusun dengan tujuan untuk mendata dan mengevaluasi hasil kerja dari instansi pemerintah dalam 1 (satu) triwulan, guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program kerja tahun berikutnya, sehingga instansi pemerintah tersebut mampu eksis

dan unggul di era perubahan global yang cepat dan dalam tingkat persaingan yang semakin ketat di lingkungan sebagaimana kondisi saat ini. Oleh karenanya, setiap instansi pemerintah harus terus menerus melakukan perbaikan diberbagai bidang berdasarkan tahapan-tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi kepada optimalisasi hasil yang akan dicapai demi kesejahteraan masyarakat.

1.1 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM. Balai POM di Mamuju merupakan salah satu UPT Badan POM yang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Balai POM di Mamuju dipimpin oleh seorang Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi III dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dijelaskan Balai POM di Mamuju mempunyai **tugas** dan **fungsi** sebagai berikut :

Tugas :

Melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan
- c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian

- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan
- e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan
- f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan
- g. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan
- h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan
- i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber
- k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.2. Aspek Strategis Organisasi

Balai POM di Mamuju sebagai bagian integral dari Badan POM RI dalam melaksanakan pengawasan, sangat berkaitan erat dengan sistem ketahanan nasional karena pada realitanya mempunyai posisi yang strategis yaitu tugas dan fungsinya memberikan perlindungan kepada masyarakat/konsumen dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Peran dan fungsi Badan POM yang sangat penting dan strategis dalam mendorong tercapainya agenda prioritas pembangunan RPJMN 2020-2024, ditetapkan pokok-pokok kegiatan strategi yang di fokuskan pada 4 (empat) pilar utama, sebagai berikut:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi.
2. Pengawasan Obat dan Makanan setelah beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Papua Barat.
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Berdasarkan hal tersebut, Balai POM di Mamuju sebagai unit pengawas obat dan makanan di Mamuju perlu melakukan penguatan, baik kelembagaan maupun sumber daya manusia sehingga kinerja dimasa mendatang semakin optimal dan memastikan berjalannya proses pengawasan obat dan makanan yang lebih baik dalam koridor hukum dalam menjaga keamanan mutu serta manfaat obat dan makanan. Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan kesehatan masyarakat Sulawesi Barat pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Kemajuan ilmu dan teknologi dewasa ini membawa perubahan yang besar pada industri farmasi dan makanan dengan adanya penemuan baru maka skala produksi berkembang cepat baik dari segi jumlah, dan jenis maupun kualitas produknya. Untuk menjamin bahwa produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanan, khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan saat beredar, maka harus dilakukan pengawasan oleh Balai POM di Mamuju sebagai lini kedua, setelah pengawasan oleh produsen itu sendiri pada lini pertama, dan tidak kalah penting adalah pengawasan lini ketiga oleh konsumen sebagai

penentu/keputusan akhir terhadap konsumsi suatu produk. Oleh karena itu perlu dilakukan Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) ke masyarakat secara rutin dan berkelanjutan. Terlebih lagi, fakta di lapangan menunjukkan adanya produsen yang melakukan pelanggaran di bidang obat dan makanan, seperti penambahan Bahan Kimia Obat pada obat tradisional dan penggunaan bahan berbahaya pada produksi makanan dan kosmetika.

Era globalisasi/perdagangan bebas yang semakin maju menuntut kesiapan industri dalam negeri untuk dapat bersaing dengan produk dari luar negeri. Untuk itu Balai POM di Mamuju perlu melakukan pemberdayaan terhadap industri secara intensif melalui pembinaan dalam penerapan *Good Manufacturing Practices* (GMP) sehingga daya saing produk Indonesia di dalam dan luar negeri meningkat.

Trend pengobatan sendiri di masyarakat yang diikuti dengan adanya promosi dan iklan yang gencar dengan informasi yang cenderung berlebihan/menyesatkan dapat menyebabkan penggunaan obat yang berlebihan dan tidak sebagaimana mestinya. Adanya peredaran produk tidak terdaftar dan atau palsu serta peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika pada jalur yang tidak resmi membutuhkan perhatian khusus untuk dapat ditanggulangi. Untuk itu, Distribusi dan penggunaan sediaan farmasi tersebut sangat perlu diawasi oleh Balai POM di Mamuju.

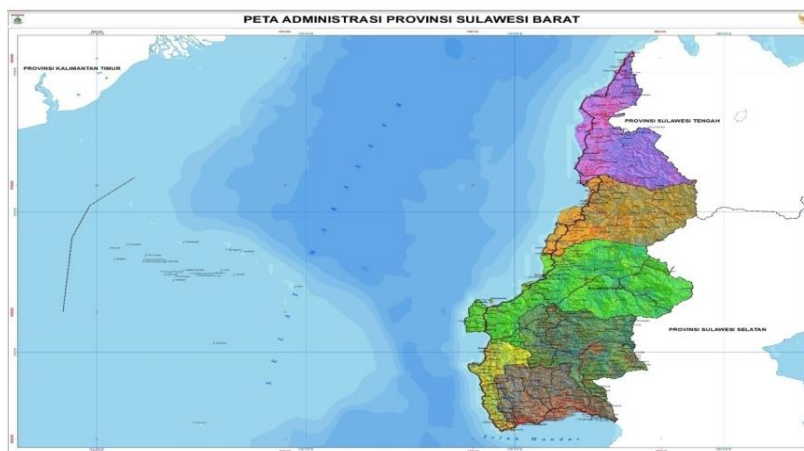
1.3 Analisis Lingkungan Strategis

Sejak tahun 2017 Balai POM di Mamuju telah menjadi satker mandiri. Dalam melaksanakan operasional kegiatan Balai POM di Mamuju telah menempati Gedung Baru yang beralamat di Jalan Poros Kalukku KM 13 Desa Bambu sejak awal tahun 2020. Gedung yang ditempati untuk operasional kegiatan perkantoran saat ini merupakan realisasi pembangunan tahap 1 (satu) yaitu pembangunan 3 Gedung Laboratorium (Laboratorium Teranakoko, Laboratorium Pangan dan Laboratorium Mikrobiologi) dan rencana kedepannya akan dilanjutkan untuk pembangunan Tahap 2 yaitu Gedung Kantor dan

Gedung Layanan Publik. Tahap ke-3 adalah pembangunan sarana dan prasarana lingkungan lainnya.

Adanya Gempa Bumi tanggal 15 Januari 2021 menyebabkan kerusakan berat pada Gedung Laboratorium Mikrobiologi dan kerusakan ringan pada Gedung Laboratorium Pangan dan Teranokoko. Hal ini menyebabkan sebagian besar pengujian masih harus dilakukan di Balai Besar POM di Makassar dan kelompok substansi pemeriksaan dan penindakan harus melakukan kegiatan perkantoran di dalam tenda darurat.

Letak Geografis



Gambar 1. 1 Peta Provinsi Sulawesi Barat

Batas wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah :

- Sebelah Utara : Sulawesi Tengah
- Sebelah Timur : Sulawesi Selatan
- Sebelah Selatan : Sulawesi Selatan
- Sebelah Barat : Selat Makassar

Luas wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah 16.787,18 km persegi (sulbar.bps.go.id, 2020). Secara administratif Provinsi Sulawesi Barat terbagi

menjadi 6 (Enam) Kabupaten, yaitu Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju, terdiri dari 69 Kecamatan dan 650 Desa/Kelurahan/Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) (sulbar.bps.go.id, 2017). Letak geografis Provinsi Sulawesi Barat yang berada di antara Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah dengan Selat Makassar yang berbatasan langsung dengan Pulau Kalimantan, menjadikannya sebagai salah satu tujuan dari aktivitas perdagangan obat dan makanan di Kawasan Timur Indonesia. Kondisi ini menjadi poin penting bagi Balai POM di Mamuju untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan.

Beberapa aspek penting yang menjadi *concern* pengawasan Balai POM di Mamuju antara lain :

- Penjualan *online* produk obat dan makanan yang Tidak Memiliki Izin Edar dan/atau mengandung Bahan Berbahaya
- Jalur perdagangan obat dan makanan di Wilayah Indonesia Timur
- Komoditi yang banyak beredar di Sulawesi Barat berdasarkan jumlah dan nilai adalah Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar dan/atau mengandung Bahan Berbahaya
- Obat tertentu yang sudah dibatalkan izin edarnya masih ditemukan beredar Sulawesi Barat
- Sulawesi Barat merupakan daerah penghasil produk perikanan dan perkebunan khususnya produk kakao dan minyak sawit sehingga diperlukan pengawasan sebelum diolah dengan bersinergi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait

1.4 Isu Strategis dan Permasalahan Utama

Perubahan dinamis pada lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun eksternal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja Balai POM di Mamuju. Lingkungan strategis dengan berbagai isu strategisnya banyak berperan dalam pencapaian kinerja Balai POM di Mamuju. Pelaksanaan

peran dan fungsi Balai POM di Mamuju tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan target hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan permasalahan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat. Adapun isu strategis tahun 2021 diantaranya sebagai berikut.

1. Adanya Bencana Gempa Bumi 6.2 Magnitudo Tanggal 15 Januari 2021 di Provinsi Sulawesi Barat yang menyebabkan 3 gedung laboratorium dan Talud BPOM di Mamuju mengalami kerusakan. Dari 3 gedung, 1 gedung mengalami rusak berat dan 2 gedung mengalami rusak ringan. Bencana ini menyebabkan terhambatnya kegiatan perkantoran selama kurang lebih 1 bulan hingga status tanggap darurat dicabut dan cukup berdampak pada kinerja Balai hingga triwulan IV tahun 2021 yaitu progress fisik gedung belum 100%.
2. Pandemi Virus Covid-19
Adanya pandemi virus Covid-19 memberi dampak yang sangat signifikan terhadap pencapaian kinerja Balai POM di Mamuju sehingga capaian sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 belum optimal. Hal ini sebabkan oleh masih adanya pembatasan-pembatasan dalam berkegiatan yang mengumpulkan banyak orang dan sekolah-sekolah masih menerapkan *School From Home*. Hal tersebut sudah diatasi dengan mengubah metode pelaksanaan kegiatan dari luring menjadi pertemuan daring. Namun untuk beberapa kegiatan yang dirasa kurang optimal jika mengadakan pertemuan daring karena di beberapa titik di Sulawesi Barat tidak memiliki jaringan internet, maka kegiatan tetap dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat ataupun mengurangi jumlah orang per kegiatan
3. Proses distribusi produk yang semakin mudah ke Wilayah Sulawesi Barat termasuk di dalamnya adalah produk ilegal
4. Adanya pelabuhan-pelabuhan kecil yang belum dapat dikawal secara intensif oleh Balai POM di Mamuju

5. Semakin banyak produsen peracik kosmetik rumahan yang tidak memiliki Izin Edar dan/atau mengandung Bahan Berbahaya
6. Maraknya perdagangan Obat, Makanan, Kosmetika dan Obat Tradisional yang tidak memiliki Izin Edar dan/atau mengandung Bahan Berbahaya secara *Online*
7. Peredaran Obat Obat Tertentu (OOT) dan penyalahgunaan obat semakin marak terjadi, distribusi OOT tersebut dilakukan oleh orang perorangan, bukan oleh sarana yang berhak
8. Balai POM di Mamuju saat ini sudah mempunyai laboratorium pengujian, namun 1 (satu) gedung laboratorium mikrobiologi yang digunakan untuk pengujian Covid-19 memiliki kerusakan berat sehingga laboratorium pengujian Covid-19 harus dipindahkan ke gedung laboratorium pangan. Sehingga sampai dengan triwulan III Tahun 2021 sebagian pengujian dilakukan di BBPOM di Makassar.
9. Balai POM di Mamuju terus mengupayakan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dan melaksanakan area perubahan reformasi birokrasi secara terus menerus dan berkesinambungan yang sesuai dengan tujuan dari reformasi birokrasi yaitu menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasardan kode etik aparatur negara.

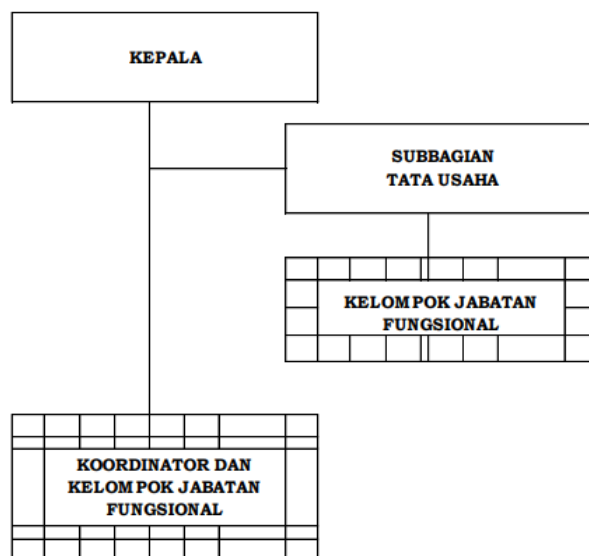
Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas, terdapat beberapa isu yang dianggap sangat krusial dan strategis bagi fungsi Balai POM di Mamuju dalam melakukan pembenahan di masa mendatang dan menyusun strategi-strategi baru yang disesuaikan dengan adanya Pandemi Covid-19 dan Gempa Bumi. Dengan disusunnya strategi-strategi baru yang disesuaikan dengan kondisi saat ini diharapkan pencapaian kinerja berikutnya dapat lebih optimal.

Berdasarkan penjelasan di atas, kapasitas Balai POM di Mamuju sebagai Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Obat dan Makanan di Sulawesi Barat masih

perlu terus dilakukan perbaikan, baik secara kelembagaan maupun dari sisi manajemen sumber daya manusianya agar pencapaian kinerja di masa datang dapat lebih optimal dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sulawesi Barat yang lebih ketat dan baik demi terjaganya keamanan, mutu serta khasiat/manfaat Obat dan Makanan. Kemudian kedepannya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan kesehatan masyarakat.

1.5 Struktur Organisasi

Stuktur Organisasi dan Tata Kerja BPOM disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai dengan struktur organisasi yang ada pada gambar 1.2 di bawah ini, secara garis besar unit-unit kerja Balai POM di Mamuju dapat dikelompokkan sebagai berikut: Sub Bagian Tata Usaha, Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur organisasi Balai POM di Mamuju tersebut dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Balai POM di Mamuju

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai POM di Mamuju didukung Struktur Organisasi, yang terdiri dari 3 Seksi dan 1 Sub Bagian Tata Usaha, Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional, yang melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara
- c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan
- d. Pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu
- e. Pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian
- f. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
- g. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

2. Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan

Pengawas masing-masing. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERENCANAAN STRATEGIS

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Balai POM di Mamuju mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2020-2024. Rencana strategis Balai POM di Mamuju yang telah disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2021 akan dijelaskan dalam rencana kinerja (*performance plan*).

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Balai POM di Mamuju. Perencanaan kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan Balai POM di Mamuju dalam satu tahun tertentu, dan melalui Perjanjian Kinerja terwujudlah komitmen Balai POM di Mamuju sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber data yang tersedia.

Pendekatan manajemen kinerja dalam Renstra Balai POM di Mamuju menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) yang merupakan *performance management tools* yang mampu menerjemahkan strategi organisasi ke dalam kerangka operasional sampai level individu, hingga setiap personil dalam organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan serta dapat berkontribusi pada kesuksesan pencapaian visi dan misi organisasi. Konsep BSC ini juga digunakan untuk mengaitkan antara informasi Rencana Strategis ke dalam Rencana Aksi (*Action Plan*) Perjanjian Kinerja. Mengaitkan antara Rencana Strategis yang lebih pada perencanaan berbasis organisasi (*organization-wide planning*) dengan perencanaan program.

2.1. Rencana Strategis

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai POM di Mamuju sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis dari BPOM di Daerah dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan pengawasan Obat dan Makanan, Badan POM menetapkan Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran yang harus dilaksanakan oleh Balai Besar / Balai POM di seluruh Indonesia termasuk Balai POM di Mamuju. Adapun penjabaran atas Visi, Misi, Tujuan dan Sasarannya sebagai berikut.

2.1.1. Visi

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang

dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan **Visi BPOM 2020-2024** yaitu:

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

- Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya Saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024 yaitu **Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.**

2.1.2 Misi

Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara komprehensif pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex specialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practise*);
2. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
3. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindak lanjut hasil pengawasan;
4. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan *people, process,*

infrastructure;

5. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada *outcome* dan *impact*;

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

- 1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: **Peningkatan kualitas manusia Indonesia**. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan Kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan

Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 2.1 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: Renstra BPOM 2020-2024, 2020

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan Penta Helix. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



Gambar 2.2 Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: <https://pentahelix.eu>.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones. (2) Karena lebih dari 80% tenaga

kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industry non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 % dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 %.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu

Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dan ke- 9 yaitu Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari premarket (produk sebelum beredar) dan postmarket (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

1) Standardisasi Obat dan Makanan

Merupakan suatu proses penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketentuan yang terkait dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Obat dan Makanan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penetapan standar persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu suatu produk akan menjadi acuan penting bagi produsen dalam pembuatan dan pengembangan/inovasi suatu produk.

2) Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi dengan memperhatikan aspek-

aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

3) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. BPOM melakukan proses pengawasan produk yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kadaluarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

4) Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

5) Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

4. *Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan*

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat

maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

2.2. Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

3. Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. Inovatif

Mampumelakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

2.3. Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

2.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai POM di Mamuju. Sasaran kegiatan yang ingin dicapai Tahun 2021 yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) antara lain sebagai berikut.

**Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja
Balai POM di Mamuju Tahun 2020-2024**

Perspektif	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
Stakeholders Perspective	SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju
			IKSK1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju
			IKSK1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di lingkup Balai POM di Mamuju
			IKSK1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di lingkup Balai POM di Mamuju
			IKSK1.5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat**
	SK2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK2.1	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di lingkup Balai POM di Mamuju
SK3	Meningkatnya	IKSK3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha	

Perspektif	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
	kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju
		IKSK3.2 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju
		IKSK3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM
<i>Internal Process Perspective</i>	SK4 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK4.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di lingkup Balai POM di Mamuju
		IKSK4.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di lingkup Balai POM di Mamuju
		IKSK4.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di lingkup Balai POM di Mamuju
		IKSK4.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di lingkup Balai POM di Mamuju
		IKSK4.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di lingkup Balai POM di

Perspektif	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
				Mamuju
			IKSK4.6	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju
			IKSK4.7	Persentase UMKM yang memenuhi standar***
	SK5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju
			IKSK5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di lingkup Balai POM di Mamuju
			IKSK5.3	Jumlah desa pangan aman di lingkup Balai POM di Mamuju
			IKSK5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di lingkup Balai POM di Mamuju
	SK6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju
			IKSK6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju
	SK7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan	IKSK7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju

Perspektif	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		
		Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju		
<i>Learning and Growth Perspective</i>	SK8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal	IKSK8.1	Indeks RB Balai POM di Mamuju
			IKSK8.2	Nilai AKIP Balai POM di Mamuju
	SK9	Terwujudnya SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja optimal	IKSK9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju
	SK10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju	IKSK10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP
			IKSK10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal
	SK11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara	IKSK11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju
IKSK11.2			Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Mamuju*	

Perspektif	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
	Akuntabel	

Sumber: Sasaran Kegiatan, 2021

Keterangan:

*) Merupakan indikator yang hanya digunakan pada tahun 2020-2021

***) Merupakan indikator yang bertambah di tahun 2021

****) Merupakan indikator yang bertambah di tahun 2022

Adapun penjelasan untuk setiap sasaran kegiatan sebagai berikut.

1. Stakeholder Perspective

a. Sasaran Strategis Ke-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju

Komoditas/produk yang diawasi Balai POM di Mamuju tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: **pertama**, standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. **Ke-dua**, penilaian (*pre-market evaluation*) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. **Ke-tiga**, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu,

konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis BPOM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia salah satunya Balai POM di Mamuju. **Ke-empat**, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. **Ke-lima**, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justitia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Sasaran strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut.

- a. **Persentase obat yang memenuhi syarat**
- b. **Persentase makanan yang memenuhi syarat**
- c. **Persentase obat makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan**
- d. **Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan**

Indikator ini sekaligus sebagai salah salah ukuran keberhasilan tujuan BPOM dan Balai POM di Mamuju yaitu “Meningkatnya jaminan

produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat”.

b. Sasaran Strategis ke-2: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai POM di Mamuju melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu **Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di lingkup Balai POM di Mamuju**

c. Sasaran Strategis ke-3: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju

Sebagai salah satu UPT dari Lembaga pemerintah non kementerian, Balai POM di Mamuju berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik Balai POM di Mamuju, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik Balai POM di Mamuju bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- 1) **Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju**
- 2) **Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju**
- 3) **Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM**

2. Internal Process Perspective

a. Sasaran Strategis ke-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai POM di Mamuju

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai POM di Mamuju mampu melindungi masyarakat dengan optimal di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai POM di Mamuju, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai POM di Mamuju akan meningkatkan efektivitasnya apabila Balai POM di Mamuju mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Balai

POM di Mamuju perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- 1) **Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di lingkup Balai POM di Mamuju**
 - 2) **Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di lingkup Balai POM di Mamuju**
 - 3) **Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di lingkup Balai POM di Mamuju**
 - 4) **Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di lingkup Balai POM di Mamuju**
 - 5) **Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di lingkup Balai POM di Mamuju**
 - 6) **Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju**
- b. **Sasaran Strategis ke-5: Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju**

Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) obat dan makanan dilakukan untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai obat dan makanan yang berbahaya. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- 1) **Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju**
- 2) **Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di lingkup Balai POM di Mamuju**
- 3) **Jumlah desa pangan aman di lingkup Balai POM di Mamuju**
- 4) **Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di lingkup Balai POM di Mamuju**

c. Sasaran Strategis ke-6: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju

Balai POM di Mamuju merupakan UPT yang melakukan pemeriksaan dan pengujian sampel obat dan makanan di Provinsi Sulawesi Barat. Dalam melakukan pengujian tentu harus menggunakan parameter yang sesuai agar hasil pengujian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- 1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju**
- 2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju**

d. Sasaran Strategis ke-7: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai POM di Mamuju menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai POM di Mamuju melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga

mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah: **Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju**

3. *Learning & Growth Perspective*

1. **Sasaran Strategis ke-8: Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal**

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, Balai POM di Mamuju sebagai salah satu UPT BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 6 (enam) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Balai POM di Mamuju akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2020-2024, Balai POM di Mamuju berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM di Mamuju agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM di Mamuju untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BPOM di Mamuju, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM di Mamuju. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

- 1) Indeks RB Balai POM di Mamuju
 - 2) Nilai AKIP Balai POM di Mamuju
2. **Sasaran Strategis ke-9: Terwujudnya SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja optimal**

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir,

pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pension dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah **Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju**

3. Sasaran Strategis ke-10: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas Balai POM di Mamuju di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan *database*-nya belum di-*update* secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah:

- 1) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP**
- 2) Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal**

4. Sasaran Strategis ke-11: Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BPOM di Mamuju dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-11, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

- 1) Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju
- 2) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Mamuju

2.5. Rencana Kerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan rujukan atau pedoman pelaksanaan kegiatan dalam 1 (satu) tahun. RKT memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun 2021, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi pencapaian kinerja Balai POM di Mamuju.

Tabel 2.2 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2021

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
<i>Stakeholders Perspective</i>	SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju	83.60
			IKSK1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju	84.00
			IKSK1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu	85.00

Perspektif	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		
			berdasarkan hasil pengawasan di lingkup Balai POM di Mamuju		
		IKSK1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di lingkup Balai POM di Mamuju	80.00	
		IKSK1.5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	88.00	
	SK2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK2.1	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di lingkup Balai POM di Mamuju	68.00
	SK3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap	IKSK3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di lingkup	91.10

Perspektif	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	Balai POM di Mamuju	
		IKSK3.2 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	74.00
		IKSK3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	86.75
<i>Internal Process Perspective</i>	SK4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK4.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di lingkup Balai POM di Mamuju	100.00
		IKSK4.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di lingkup Balai POM di Mamuju	64.00
		IKSK4.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di lingkup Balai POM di Mamuju	82.00
		IKSK4.4 Persentase sarana produksi Obat dan	60.00

Perspektif	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Makanan yang memenuhi ketentuan di lingkup Balai POM di Mamuju	
		IKSK4.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di lingkup Balai POM di Mamuju	60.00
		IKSK4.6 Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju	3.75
	SK5 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK5.1 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	89.50
		IKSK5.2 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di lingkup Balai POM di Mamuju	40.00
		IKSK5.3 Jumlah desa pangan aman di lingkup Balai POM di Mamuju	12.00
		IKSK5.4 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di lingkup Balai POM di Mamuju	2.00
	SK6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan	IKSK6.1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di	100.00

Perspektif	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
	produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK6.2	lingkup Balai POM di Mamuju Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju	100.00
	SK7 Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	97.00
<i>Learning and Growth Perspective</i>	SK8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal	IKSK8.1	Indeks RB Balai POM di Mamuju	64.00
		IKSK8.2	Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	75.40
	SK9 Terwujudnya SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja optimal	IKSK9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju	82.00
	SK10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan	IKSK10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan	53.00

Perspektif	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju	Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP IKSK10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal 2.00
	SK11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel	IKSK11.1 IKSK11.2	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Mamuju 92.50 Efisien (95%)

Sumber: Dokumen RKT Balai POM di Mamuju Tahun, 2021

2.6. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, antara Kepala Balai POM di Mamuju sebagai penerima amanah dengan Kepala Badan POM RI sebagai pemberi amanah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai POM di Mamuju sebagai unit kerja Eselon III wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai POM di Mamuju) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Balai POM di Mamuju Tahun 2021 merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun.

Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Balai POM di Mamuju.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (*budgeting process*) selesai atau setelah alokasi anggaran. Adapun Lampiran Perjanjian Kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju	83.60
		IKSK1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju	84.00
		IKSK1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di lingkup Balai POM di Mamuju	85.00
		IKSK1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di lingkup Balai POM di Mamuju	80.00
		IKSK1.5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	88.00
SK2	Meningkatnya kesadaran	IKSK2.1	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness</i>)	68.00

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
	masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju		<i>index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di lingkup Balai POM di Mamuju	
SK3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	91.10
		IKSK3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	74.00
		IKSK3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	86.75
SK4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan	IKSK4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di lingkup Balai POM di Mamuju	100.00

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
	publik di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di lingkup Balai POM di Mamuju	64.00
		IKSK4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di lingkup Balai POM di Mamuju	82.00
		IKSK4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di lingkup Balai POM di Mamuju	60.00
		IKSK4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di lingkup Balai POM di Mamuju	60.00
		IKSK4.6	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju	3.75
SK5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup	IKSK5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	89.50
		IKSK5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di lingkup Balai POM di	40.00

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
	Balai POM di Mamuju		Mamuju	
		IKSK5.3	Jumlah desa pangan aman di lingkup Balai POM di Mamuju	12.00
		IKSK5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di lingkup Balai POM di Mamuju	2.00
SK6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju	100.00
		IKSK6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju	100.00
SK7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	97.00
SK8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang	IKSK8.1	Indeks RB Balai POM di Mamuju	64.00
		IKSK8.2	Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	75.40

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
	optimal			
SK9	Terwujudnya SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja optimal	IKSK9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju	82.00
SK10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju	IKSK10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP	53.00
		IKSK10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal	2.00
SK11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel	IKSK11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju	92.50
		IKSK11.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Mamuju	Efisien (95%)

Sumber: Dokumen PK Balai POM di Mamuju, 2021

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau kinerja dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi. Untuk pemantauan secara berkala, telah dibuat Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (RAPK) yang digunakan oleh pimpinan puncak untuk memonitor dan mengevaluasi capaian kinerja pertriwulan.

2.7. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) merupakan dokumen perencanaan pencapaian kinerja pertriwulan. Adanya dokumen ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan sebagai sarana yang akan digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja setiap tiga bulan. Diharapkan dengan adanya RAPK capaian kinerja dapat lebih optimal.

Tabel 2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2021

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target			
				B03	B06	B09	B12
SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK 1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju	83.6	83.6	83.6	83.60
		IKSK 1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju	80	80	80	84.00
		IKSK 1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di lingkup Balai POM di Mamuju	82	82	82	85.00
		IKSK 1.4	Persentase Makanan yang	80	80	80	80.00

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target			
				B03	B06	B09	B12
			aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di lingkup Balai POM di Mamuju				
		IKSK 1.5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	-	-	-	88.00
SK2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK 2.1	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di lingkup Balai POM di Mamuju	-	-	-	68.00
SK3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan	IKSK 3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di	-	-	-	91.10

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target			
				B03	B06	B09	B12
	Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju		lingkup Balai POM di Mamuju				
		IKSK 3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	-	-	-	74.00
		IKSK 3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	-	86.75
SK4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK 4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di lingkup Balai POM di Mamuju	80	80	80	100.00
		IKSK 4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di lingkup Balai POM di Mamuju	60.7	60.7	60.7	64.00

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target			
				B03	B06	B09	B12
		IKSK 4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di lingkup Balai POM di Mamuju	82	82	82	82.00
		IKSK 4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di lingkup Balai POM di Mamuju	55	55	55	60.00
		IKSK 4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di lingkup Balai POM di Mamuju	53	53	53	60.00
		IKSK 4.6	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju	-	-	-	3.75
SK5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup	IKSK 5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	79,18	79,18	79,18	89.50
		IKSK 5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan	20%	50%	80%	40.00

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target			
				B03	B06	B09	B12
	Balai POM di Mamuju		Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di lingkup Balai POM di Mamuju				
		IKSK 5.3	Jumlah desa pangan aman di lingkup Balai POM di Mamuju	20%	50%	80%	12.00
		IKSK 5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di lingkup Balai POM di Mamuju	20%	50%	80%	2.00
SK6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK 6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju	21.33	51.87	71.18	100.00
		IKSK 6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju	21.33	49.33	66.67	100.00
SK7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di	IKSK 7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di	20	30	40	97.00

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target			
				B03	B06	B09	B12
	lingkup Balai POM di Mamuju		lingkup Balai POM di Mamuju				
SK8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal	IKSK 8.1	Indeks RB Balai POM di Mamuju	-	-	-	64.00
		IKSK 8.2	Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	-	-	-	75.40
SK9	Terwujudnya SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja optimal	IKSK 9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju	-	-	-	82.00
SK10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju	IKSK 10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP	-	-	-	53.00
		IKSK 10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal	2	2	2	2.00
SK11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di	IKSK 11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju	25	50	75	92.50

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target			
				B03	B06	B09	B12
	Mamuju secara Akuntabel	IKSK 11.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Mamuju	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (95%)

2.8. Kerangka Pendanaan

Sesuai Target Kinerja masing-masing Indikator Kinerja yang telah ditetapkan, maka Kerangka Pendanaan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Kegiatan Balai POM di Mamuju tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 Kerangka Pendanaan Kegiatan 2021

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Pendanaan
SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju	109,440,715.00
		IKSK1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju	43,527,715.00
		IKSK1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di lingkup Balai POM di Mamuju	109,440,714.00
		IKSK1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di lingkup Balai POM di Mamuju	43,527,714.00
		IKSK1.5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	22,277,000.00

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Pendanaan
SK2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK2.1	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di lingkup Balai POM di Mamuju	295,662,250.00
SK3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	39,983,500.00
		IKSK3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	86,629,500.00
		IKSK3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	273,911,250.00

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Pendanaan
SK4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di lingkup Balai POM di Mamuju	96,174,000.00
		IKSK4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di lingkup Balai POM di Mamuju	96,174,000.00
		IKSK4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di lingkup Balai POM di Mamuju	9,544,500.00
		IKSK4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di lingkup Balai POM di Mamuju	8,688,000.00
		IKSK4.5	Persentase sarana	77,941,500.00

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Pendanaan
			distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di lingkup Balai POM di Mamuju	
		IKSK4.6	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju	295,662,250.00
SK5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	295,662,250.00
		IKSK5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di lingkup Balai POM di Mamuju	630,719,000.00
		IKSK5.3	Jumlah desa pangan aman di lingkup Balai POM di Mamuju	618,501,000.00
		IKSK5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di lingkup Balai POM di Mamuju	69,308,000.00
SK6	Meningkatnya	IKSK6.1	Persentase sampel	109,440,714.00

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Pendanaan
	efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju		Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju	
		IKSK6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju	43,527,714.00
SK7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	176,905,000.00
SK8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal	IKSK8.1	Indeks RB Balai POM di Mamuju	8,818,210,000.00
		IKSK8.2	Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	407,890,500.00
SK9	Terwujudnya SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja	IKSK9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju	407,890,500.00

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Pendanaan
	optimal			
SK10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju	IKSK10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP	17,870,714.00
		IKSK10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal	2,021,691,000.00
SK11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel	IKSK11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju	2,021,691,000.00
		IKSK11.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Mamuju	2,021,691,000.00
Jumlah				19,269,583,000

Sumber :RAPK Balai POM di Mamuju, 2021

2.9 Metode Pengukuran

Pengukuran kinerja adalah membandingkan antara kinerja nyata (capaian kinerja) dengan kinerja yang direncanakan pada tahun berjalan untuk dapat mengukur kinerja baik kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja Sasaran Program dan Pengukuran Kinerja Kegiatan. Setiap akhir periode kegiatan instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Pada tahun 2021 capaian kinerja lebih ditekankan pada indikator *outcome*, namun demikian indikator *input* dan *output* tetap menjadi pertimbangan untuk menghitung efisiensi kegiatan.

Adapun cara pengukuran dan Kriteria pencapaian indikator kinerja adalah sebagai berikut:

Cara Pengukuran % Capaian Indikator Kinerja sebagai berikut.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS).

Cara Perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebagai berikut.

$$1) \text{ NPS Per Sasaran} = \{ \% \text{ capaian indikator1} + \% \text{ capaian indikator2} + \dots \% \text{ capaian indikator}n \} / n$$

Keterangan :

- Sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator sasaran → NPS ditentukan dengan menghitung persentase capaian indikator.
- Sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator → NPS ditentukan dengan menghitung **rata-rata persentase** capaian seluruh indikator.
- Indikator dengan capaian >120%, penghitungan **NPS menggunakan nilai maks 120%**

$$2) \text{ NPS per Perspektif} = \{ \% \text{capaian sasaran}_1 + \% \text{capaian sasaran}_2 + \dots \% \text{capaian sasaran}_n \} / n$$

Keterangan :

- Perspektif yang memiliki lebih dari 1 (satu) sasaran → NPS ditentukan dengan menghitung **rata-rata persentase capaian seluruh sasaran dalam 1 (satu) perspektif.**

$$3) \text{ NPS Total} = \{ \text{NPS Perspektif}_1 + \text{NPS Perspektif}_2 + \text{NPS Perspektif}_3 \} / 3$$

Keterangan :

- NPS total ditentukan dengan menghitung **rata-rata persentase capaian seluruh perspektif.**

Tabel 2.6 Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2020

Kriteria	Rentang Capaian Lapkin 2021
Sangat Kurang	<50
Kurang	50 - <70
Cukup	70 - <90
Baik	90 - <110
Sangat Baik	110 - 120
Tidak Dapat Disimpulkan	> 120

Penetapan kriteria ini bertujuan untuk :

1. Mencegah rendahnya penetapan target kinerja tahunan;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. *Me-review* penetapan target kinerja tahunan.

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2021. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di Balai POM di Mamuju adalah sebagai berikut :

1. Adanya penunjukan 1 orang petugas penanggungjawab data di BPOM di Mamuju yang disahkan oleh SK Kepala BPOM;
2. Kepala Balai POM di Mamuju menunjuk perwakilan penanggungjawab data disetiap kelompok substansi dengan menerbitkan SK Kepala Balai POM di Mamuju;
3. Penanggung jawab data di setiap kelompok substansi menginput data kinerja pada *bit.ly data base online* Balai POM di Mamuju secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Balai;
4. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk menginput data setiap bulan pada *bit.ly RAPK-RHPK UPT*, aplikasi SMART DJA, BOC, monev Tepra, monev Bappenas, aplikasi SAS dan setiap triwulan pada aplikasi simetris modul *e-performace*;

5. Pengukuran ini pun diintegrasikan dengan aplikasi e-SKP pada aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level individu secara periodik triwulanan;
6. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis BPOM di Mamuju guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2021 terhadap target yang telah ditetapkan pada akhir tahun 2021 sebagai periode ke-2 Renstra 2020-2024, membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja triwulan IV tahun 2021 dan dengan target tahun 2021. Kemudian dilakukan juga analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pengukuran terhadap capaian kinerja suatu organisasi merupakan kegiatan manajemen yang digunakan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk memenuhi kewajiban dalam hal mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan

pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan.

Pengukuran capaian kinerja tahun 2021 dilakukan terhadap kinerja yang dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021. Formula dalam perhitungan capaian kinerja yaitu:

$$\% \text{ Capaian} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

Pada Perjanjian Kinerja tahun 2021 telah ditetapkan 11 (sebelas) sasaran kegiatan. Pencapaian sasaran kegiatan diukur dengan ditetapkannya 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja kegiatan, yang semua indikator kinerja yang ditetapkan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sehingga dalam pengukuran pencapaian kinerja Balai POM di Mamuju Tahun 2021 dihitung berdasarkan 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan dengan 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja utama dengan target seperti yang telah dijabarkan sebelumnya pada Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Pada tahun Triwulan IV Tahun 2021 Balai POM di Mamuju telah berhasil mencapai NPS total dengan kriteria BAIK yang terdiri dari 1 sasaran kegiatan dengan kriteria BAIK, 2 sasaran kegiatan dengan kriteria CUKUP, 3 sasaran kegiatan dengan kriteria KURANG, 1 sasaran kegiatan dengan kriteria TIDAK DAPAT DISIMPULKAN, dan 4 sasaran kegiatan yang akan tercapai di akhir tahun. Adapun detail Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebagai berikut:

Tabel 3.1. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target TW IV	Realisasi			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
				2021					
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	83.60	83.60	262.00	277.00	94.58	113.14	113.14	SANGAT BAIK
IKSK1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	80.00	84.00	68.00	70.00	97.14	115.65	115.65	SANGAT BAIK
IKSK1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	82.00	85.00	93.00	103.00	90.29	106.23	106.23	BAIK
IKSK1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	80.00	80.00	37.00	41.00	90.24	112.80	112.80	SANGAT BAIK

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target TW IV	Realisasi			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
				2021					
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK1.5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	88.00	88.00	39.00	50.00	78.00	88.64	88.64	CUKUP
SK1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju							107.29	107.29	BAIK
IKSK2.1	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	73.00	68.00	-	-	67.81	99.72	99.72	BAIK
SK2 Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju							99.72	99.72	BAIK
IKSK3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	84.50	91.10	-	-	93.40	102.52	102.52	BAIK

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target TW IV	Realisasi			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
				2021					
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	74.00	74.00	-	-	61.50	83.11	83.11	CUKUP
IKSK3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	86.75	86.75	-	-	69.49	80.10	80.10	CUKUP
SK3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju							88.58	88.58	CUKUP
Stakeholders Perspective							98.53	98.53	BAIK
IKSK4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	100.00	100.00	-	-	100.00	100.00	100.00	BAIK

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target TW IV	Realisasi			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
				2021					
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	64.00	64.00	-	-	51.40	80.31	80.31	CUKUP
IKSK4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	82.00	82.00	4.00	4.00	100.00	121.95	121.95	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
IKSK4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	60.00	60.00	15.00	26.00	57.69	96.15	96.15	BAIK
IKSK4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	60.00	60.00	75.00	129.00	58.14	96.90	96.90	BAIK

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target TW IV	Realisasi			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
				2021					
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK4.6	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju	3.75	3.75	-	-	4.35	116.00	116.00	SANGAT BAIK
SK4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Mamuju							101.89	101.89	BAIK
IKSK5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	89.50	89.50	-	-	95.93	107.18	107.18	BAIK
IKSK5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	40.00	40.00	-	-	40.00	100.00	100.00	BAIK
IKSK5.3	Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	12.00	12.00	-	-	12.00	100.00	100.00	BAIK
IKSK5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	2.00	2.00	-	-	2.00	100.00	100.00	BAIK

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Tahunan	Target TW IV	Realisasi			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan	
			2021						
			Pembilang	Penyebut	Realisasi				
SK5 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju							101.80	101.80	BAIK
IKSK6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	100.00	100.00	-	-	100.00	100.00	100.00	BAIK
IKSK6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	100.00	100.00	-	-	100.00	100.00	100.00	BAIK
SK6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju							100.00	100.00	BAIK
IKSK7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	97.00	97.00	-	-	125.00	128.87	128.87	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Tahunan	Target TW IV	Realisasi			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan	
			2021						
			Pembilang	Penyebut	Realisasi				
SK7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju							128.87	128.87	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
<i>Internal Process Perspective</i>							108.14	108.14	BAIK
IKSK8.1	Indeks RB Balai POM di Mamuju	64.00	64.00	-	-	64.02	100.03	100.03	BAIK
IKSK8.2	Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	75.40	75.40	-	-	-	Nilai Belum Keluar	Nilai Belum Keluar	-
SK8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal							100.03	100.03	BAIK
IKSK9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju	82.00	82.00	-	-	82.36	100.44	100.44	BAIK
SK9 Terwujudnya SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja optimal							100.44	100.44	BAIK

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target TW IV	Realisasi			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
				2021					
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP	53.00	53.00	-	-	51.94	98.00	98.00	BAIK
IKSK10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal	2.00	2.00	-	-	1.53	76.50	76.50	CUKUP
SK10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju							87.25	87.25	CUKUP
IKSK11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju	92.50	92.50	-	-	89.40	96.65	96.65	BAIK
IKSK11.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Mamuju	95.00	95.00	-	-	100.00	105.26	105.26	BAIK
SK11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel							100.96	100.96	BAIK
<i>Learning and Growth Perspective</i>							100.96	100.96	BAIK
NPS Total							102.54	102.54	BAIK

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Berikut akan dibahas analisa lebih detail terkait capaian masing-masing sasaran kegiatan dan IKU.

SASARAN KEGIATAN 1

“Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju”

Capaian dari Sasaran Kegiatan 1 (SK 1) diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Mamuju. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1 Triwulan IV tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Sasaran Kegiatan 1

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi 2021			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
			Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK1.1 Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	83.60	83.60	262.00	277.00	94.58	113.14	113.14	SANGAT BAIK
IKSK1.2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	84.00	84.00	68.00	70.00	97.14	115.65	115.65	SANGAT BAIK
IKSK1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	85.00	85.00	93.00	103.00	90.29	106.23	106.23	BAIK
IKSK1.4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	80.00	80.00	37.00	41.00	90.24	112.80	112.80	SANGAT BAIK
IKSK1.5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	88.00	88.00	39.00	50.00	78.00	88.64	88.64	CUKUP
SK1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju						107.29	107.29	BAIK

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Persentase capaian kinerja 4 (empat) Indikator Kinerja pada Sasaran Kegiatan 1 triwulan IV 2021 berkisar antara 88.64% s/d 118.14%. Rata-rata capaian indikator kinerja merupakan capaian dari SK1 yaitu dengan capaian 107.29% dan termasuk dalam kriteria Baik. Capaian tertinggi terdapat pada indikator persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

yaitu sebesar 118.14% namun termasuk kriteria Sangat Baik. Sedangkan capaian terendah yaitu persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat yaitu sebesar 88.64% termasuk kriteria cukup. Balai POM di Mamuju akan terus berupaya mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat terkait pengawasan obat dan makanan yang aman dan bermutu sehingga capaian sesuai dengan yang direncanakan.

Berdasarkan UU Kesehatan No.36 Tahun 2009 disebutkan bahwa definisi Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Pada sasaran kegiatan I yaitu terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, SK 1 terdiri atas 5 indikator kegiatan sebagai berikut.

1. Persentase obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Kerja Balai POM di Mamuju
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Kerja Balai POM di Mamuju
5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

Berikut akan diuraikan analisa capaian pada setiap Indikator Kinerja SK1.

IKU 1. Persentase Obat yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju

IKU 1 “Persentase Obat yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju” dihitung berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\% \text{Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1.1

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
			2021					
			Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK1.1 Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	83.60	83.60	262.00	277.00	94.58	113.14	113.14	SANGAT BAIK

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Realisasi pada triwulan IV diperoleh sampel obat yang memenuhi syarat sebanyak 262 sampel dari 277 sampel yang telah diperiksa dan diuji. Pada Bulan Januari terjadi gempa bumi sehingga pengujian baru dilakukan pada bulan Maret di Laboratorium Balai Besar POM di Makassar. Capaian persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju berdasarkan tabel di atas adalah 118.14% dengan kategori sangat baik.

Adapun hal-hal yang menunjang keberhasilan capaian persentase Obat yang memenuhi syarat ini, yaitu sebagian kegiatan pengujian obat sampai triwulan III masih dilakukan di Balai Besar Makassar dengan dukungan peralatan dan reagen yang lengkap serta kerja tim pengujian yang baik dalam melakukan kegiatan sampling dan pengujian sampel rutin hingga memenuhi target.

Tindak lanjut yang telah dilakukan yaitu:

1. Telah di lakukannya percepatan pengadaan reagen dan operasional pengujian, sehingga penyelesaian sampel obat yang memenuhi syarat dicapai sesuai target dan timeline pengujian.
2. adanya redistribusi pegawai dari balai lain yg di tambahkan ke Balai POM mamuju pada bulan maret sangat membantu dalam penyelesaian sampel di karenakan jumlah SDM pengujian telah bertambah.
3. kegiatan pengujian yang telah dilakukan diluar jam kerja untuk memenuhi target.
4. Realokasi anggaran untuk penambahan alat gelas yang masih kurang
5. Perencanaan pengadaan HPLC (High Performance Liquid Chromatogram) tahun anggaran 2022

Tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut yaitu:

1. Penyusunan dan kegiatan sampling harus sesuai rencana dan target perbulan
2. Pengujian sampel sebaiknya dilakukan sesuai POA yang telah di susun, sehingga memudahkan dalam penyelesaian pengujian itu sendiri
3. Percepatan pemenuhan alat, alat gelas, reagen dan operasional pendukung pengujian
4. Peningkatan kerjasama tim

IKU 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju

IKU 2 “Persentase Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju” dihitung berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1.2

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
			2021					
			Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK1.2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	84.00	84.00	68.00	70.00	97.14	115.65	115.65	SANGAT BAIK

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Sampel Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju pada tahun 2021 adalah sebanyak 68 sampel dari 70 sampel yang telah tersampling dan diuji hingga triwulan IV. Realisasi sampel sebesar 97.14% dengan capaian sebesar 115.65% berada pada kategori sangat baik. Adapun hal-hal yang menunjang keberhasilan capaian persentase Makanan yang memenuhi syarat ini, yaitu kerja tim pengujian dan pemeriksaan yang baik dalam melakukan kegiatan sampling dan pengujian sampel rutin hingga memenuhi target, serta dukungan penuh dari Kepala Balai POM dalam hal pemenuhan reagen dan operasional pendukung pengujian.

Adapun tindak lanjut sebelumnya yang telah dilakukan untuk mendukung pengujian sampel sebagai berikut.

1. Telah di lakukannya percepatan pengadaan reagen dan operasional pengujian, sehingga penyelesaian sampel obat yang memenuhi syarat di capai sesuai target dan timeline pengujian.
2. Adanya redistribusi pegawai dari balai lain yg di tambahkan ke Balai POM mamuju pada bulan maret sangat membantu dalam

penyelesaian sampel di karenakan jumlah SDM pengujian telah bertambah.

3. Kegiatan pengujian yang telah dilakukan diluar jam kerja untuk memenuhi target.
4. Tetap melakukan pembagian jadwal pengujian sampel Covid-19 per dua bulan
5. Percepatan pengadaan reagen dan peralatan penunjang untuk pengujian
6. Terus mengawal dalam melakukan pengawasan penandaan produk makanan yang beredar
7. Terus melakukan koordinasi dengan petugas sampling dan tim penerima sampel untuk dapat dilakukan sampling tepat waktu (Pelaksanaan sampling selesai pada akhir TW III)
8. Melakukan monitoring sampel untuk sampel yang belum memenuhi syara baik dari evaluasi penandaan maupun pengujian

Tindak lanjut kedepannya yang akan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan capaian tersebut sebagai berikut.

1. Penyusunan dan kegiatan sampling harus sesuai rencana dan target perbulan
2. Pengujian sampel sebaiknya dilakukan sesuai poa yang telah di susun, sehingga memudahkan dalam penyelesaian pengujian itu sendiri
3. Percepatan pemenuhan alat, alat gelas, reagen dan operasional pendukung pengujian
4. Kerja sama tim
5. Melakukan monitoring sampel untuk sampel yang belum memenuhi syara baik dari evaluasi penandaan maupun pengujian

IKU 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di lingkup Balai POM di Mamuju

Indikator kinerja “Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di lingkup Balai POM di Mamuju” dihitung berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\% \text{Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1.3

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
			2021					
			Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	85.00	85.00	93.00	103.00	90.29	106.23	106.23	BAIK

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Realisasi pada triwulan IV diperoleh sampel obat yang memenuhi syarat sebanyak 98 sampel yang telah dilakukan pengujian dari 108 sampel yang telah diperiksa dan diuji. Adapun hal-hal yang menunjang keberhasilan capaian persentase Obat yang memenuhi syarat hingga 106.23% termasuk kriteria baik, yaitu sebagian kegiatan pengujian obat sampai triwulan III masih dilakukan di Balai Besar Makassar dengan dukungan peralatan dan reagen yang lengkap serta kerja tim pengujian yang baik dalam

melakukan kegiatan sampling dan pengujian sampel rutin hingga memenuhi target.

Tindak lanjut yang telah dilakukan yaitu:

1. Telah di lakukannya percepatan pengadaan reagen dan operasional pengujian, sehingga penyelesaian sampel obat yang memenuhi syarat di capai sesuai target dan timeline pengujian.
2. Adanya redistribusi pegawai dari balai lain yg di tambahkan ke Balai POM mamuju pada bulan maret sangat membantu dalam penyelesaian sampel di karenakan jumlah SDM pengujian telah bertambah.
3. Kegiatan pengujian yang telah dilakukan diluar jam kerja untuk memenuhi target
4. Melakukan pengujian sampel Obat di Balai Besar POM di Makassar tahun sampai gedung laboratorium di Balai POM di Mamuju selesai dilakukan perbaikan
5. Percepatan pengujian untuk sampel rutin yang masih belum selesai
6. Percepatan pengadaan reagen untuk pengujian dan operasional pendukung pengujian
7. Terus mengawal dalam melakukan pengawasan penandaan produk obat yang beredar

Tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut yaitu

1. Melakukan pengujian sampel Obat di Balai Besar POM di Makassar tahun sampai gedung laboratorium di Balai POM di Mamuju selesai dilakukan perbaikan
2. Penyusunan dan kegiatan sampling harus sesuai rencana dan target perbulan

3. Pengujian sampel sebaiknya dilakukan sesuai POA yang telah di susun, sehingga memudahkan dalam penyelesaian pengujian itu sendiri
4. Percepatan pemenuhan alat, alat gelas, reagen dan operasional pendukung pengujian
5. Kerja sama tim

IKU 4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di lingkup Balai POM di Mamuju

Indikator kinerja “Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di lingkup Balai POM di Mamuju” dihitung berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium

Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1.4

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
			2021					
			Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK1.4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	80.00	80.00	37.00	41.00	90.24	112.80	112.80	SANGAT BAIK

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Realisasi triwulan IV sebesar 90.34% terdiri dari 37 sampel yang memenuhi syarat dan 41 sampel yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Capaian indikator ini sebesar 112.80% dan berada pada kategori baik. Adapun hal-hal yang

menunjang keberhasilan capaian persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, yaitu kerja tim pengujian dan pemeriksaan yang baik dalam melakukan kegiatan sampling dan pengujian sampel rutin hingga memenuhi target, serta dukungan penuh dari Kepala Balai POM dalam hal pemenuhan reagen dan operasional pendukung pengujian.

Tindak lanjut sebelumnya yang telah dilakukan untuk mendukung pengujian sampel sebagai berikut.

- Telah di lakukannya percepatan pengadaan reagen dan operasional pengujian, sehingga penyelesaian sampel obat yang memenuhi syarat di capai sesuai target dan timeline pengujian.
- Adanya redistribusi pegawai dari balai lain yg di tambahkan ke balai pom mamuju pada bulan maret sangat membantu dalam penyelesaian sampel di karenakan jumlah sdm pengujian telah bertambah.
- Kegiatan pengujian yang telah dilakukan diluar jam kerja untuk memenuhi target.
- Melakukan pembagian jadwal pengujian sampel Covid-19 per dua bulan

Tindak lanjut kedepannya yang akan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan capaian tersebut sebagai berikut.

- Penyusunan dan kegiatan sampling harus sesuai rencana dan target perbulan
- Pengujian sampel sebaiknya dilakukan sesuai poa yang telah di susun, sehingga memudahkan dalam penyelesaian pengujian itu sendiri
- Percepatan pemenuhan alat, alat gelas, reagen dan operasional pendukung pengujian
- Peningkatan kerjasama tim

IKU 5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian. Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi. Hasil pemeriksaan pada poin c dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengawasan.

Indikator kinerja “Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju” dihitung berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

% Pangan Fortifikasi yang MS =

$$\frac{\text{Pangan Fortifikasi yang MS}}{\text{Total Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Keterangan : Sumber data total pangan fortifikasi yang diperiksa dan diuji berasal dari pedoman sampling

Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1.5

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
			2021					
			Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK1.5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	88.00	88.00	39.00	50.00	78.00	88.64	88.64	CUKUP

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Realisasi triwulan IV sebesar 78.00% terdiri dari 39 sampel yang memenuhi syarat dan 51 sampel yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Capaian indikator ini sebesar 88.64% dan berada pada kategori cukup. Adapun hal-hal yang menunjang keberhasilan capaian persentase fortifikasi yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, yaitu kerja tim pengujian dan pemeriksaan yang baik dalam melakukan kegiatan sampling dan pengujian sampel rutin hingga memenuhi target, serta dukungan penuh dari Kepala Balai POM dalam hal pemenuhan reagen dan operasional pendukung pengujian.

Tindak lanjut sebelumnya yang telah dilakukan untuk mendukung pengujian sampel sebagai berikut.

- Telah di lakukannya percepatan pengadaan reagen dan operasional pengujian, sehingga penyelesaian sampel obat yang memenuhi syarat di capai sesuai target dan *timeline* pengujian.
- Adanya redistribusi pegawai dari balai lain yg di tambahkan ke Balai POM Mamuju pada bulan maret sangat membantu dalam penyelesaian sampel di karenakan jumlah sdm pengujian telah bertambah.
- Kegiatan pengujian yang telah dilakukan diluar jam kerja untuk memenuhi target.
- Melakukan pembagian jadwal pengujian sampel Covid-19 per dua bulan

Tindak lanjut kedepannya yang akan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan capaian tersebut sebagai berikut.

- Penyusunan dan kegiatan sampling harus sesuai rencana dan target perbulan
- Pengujian sampel sebaiknya dilakukan sesuai poa yang telah di susun, sehingga memudahkan dalam penyelesaian pengujian itu sendiri

- Percepatan pemenuhan alat, alat gelas, reagen dan operasional pendukung pengujian
- Peningkatan kerjasama tim

SASARAN KEGIATAN 2

“Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju”.

Pengukuran kinerja dari Sasaran Kegiatan 2 (SK2) didasarkan pada penilaian terhadap 1 (satu) indikator kinerja yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Mamuju. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2 tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

IKU 5. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

Tabel 3.7 Sasaran Kegiatan 2

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
			2021					
			Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK2.1 Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	68.00	68.00	-	-	67.81	99.72	99.72	BAIK
SK2 Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju						99.72	99.72	BAIK

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Realisasi kinerja Indikator Kinerja pada SK 2 Triwulan IV tahun 2021 sebesar 67.81 dengan persentase capaian sebesar 99.72% termasuk dalam kriteria baik. Jumlah responden survei di provinsi Sulawesi Barat sebanyak 520 orang. Fakta ini mengindikasikan bahwa perlu upaya untuk meningkatkan program pengawasan Obat dan Makanan serta KIE kepada masyarakat, agar kesadaran

terhadap Obat dan Makanan di provinsi-provinsi yang berada pada kategori indeks cukup baik dengan rentang “60.01-75.00” dan dibawah target yang telah ditetapkan dapat meningkat di masa yang akan datang. Berikut ini nilai Indeks Kesadaran Masyarakat Per Aspek Penyusun Indeks.

Tabel 3.8 Capaian Indeks Kesadaran Masyarakat
Per Aspek Penyusun Indeks

No	Aspek Penyusun Indeks	Indeks	Kategori Indeks
1	Indeks Pengetahuan	69.94	Cukup Baik
2	Indeks Sikap	75.15	Baik
3	Indeks Perilaku	58.35	Kurang Baik

Sumber : Laporan PRKOM BPOM 2021, 2022

Fakta ini mengindikasikan bahwa perlu upaya untuk meningkatkan KIE khususnya di provinsi-provinsi yang memiliki nilai indeks terendah. Untuk meningkatkan indeks pengetahuan adalah dengan menyusun program KIE dengan pesan utama dengan melihat capaian indeks per kategori produk dimasing-masing provinsi. Hal ini agar pengetahuan masyarakat dapat meningkat di masa yang akan datang. Untuk meningkatkan indeks sikap adalah dengan mengedukasi masyarakat secara lebih masif agar dapat bersikap lebih bijak dalam memilih/membeli/mengonsumsi Obat dan Makanan. Selain itu juga perlu diperhatikan nilai indeks sikap per kategori produk pada setiap provinsi agar program yang dilakukan tepat sasaran.

Meningkatkan indeks perilaku dapat dilakukan dengan mengedukasi masyarakat secara lebih masif agar pengetahuan masyarakat meningkat sehingga dapat bersikap lebih bijak dalam memilih/membeli/mengonsumsi Obat dan Makanan. Perlu

intervensi yang tepat agar masyarakat mau mengubah perilaku dalam memilih Obat dan Makanan melalui edukasi secara persuasif kepada masyarakat. Selain itu juga perlu memperhatikan nilai indeks perilaku per kategori produk pada setiap provinsi agar dapat dilakukan penyusunan program yang tepat sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

Berikut ini beberapa rekomendasi berdasarkan berdasarkan hasil survei yaitu:

1. Peningkatan Pengetahuan tentang Tugas dan Fungsi BPOM

a. Meningkatkan *Branding*

- BPOM perlu menerapkan strategi *branding* yang tepat untuk dapat meningkatkan citra dan membangun opini positif masyarakat. Strategi yang dapat dilakukan diantaranya dengan mensosialisasikan program dan layanan yang disediakan oleh BPOM sehingga pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat dapat dengan mudah diterima melalui berbagai media dan kegiatan diantaranya:
- Penyebaran informasi mengenai kelembagaan BPOM dengan menyampaikan pesan/tema yang terkait tugas dan fungsi utama BPOM, serta 5 (lima) produk yang menjadi objek pengawasan BPOM. Penyebaran informasi dengan strategi pemilihan media yang digunakan perlu mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayah urban-rural, tingkat Pendidikan dan pekerjaan masyarakat.
- Kemasan produk merupakan salah satu media yang dapat dijadikan sebagai sarana penyebaran informasi tentang BPOM dan produk yang diawasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk membuat informasi tentang BPOM dengan cara pencantuman Nomor Izin Edar (NIE) yang lebih jelas dan mudah terlihat serta menggunakan logo untuk pencantuman NIE pada kemasan.

- Mengintensifkan program dengan mengencarkan penggunaan *tagline* KLIK, cek BPOM dan BPOM Mobile melalui berbagai media.
- Meningkatkan kerjasama dengan *influencer*
- b. Meningkatkan Strategi Komunikasi**, melalui beberapa upaya diantaranya:
 - Sosialisasi dengan melibatkan perangkat daerah/tokoh masyarakat/tokoh agama/organisasi dan komunitas masyarakat.
 - Meningkatkan penggunaan media sosial dengan penyampaian pesan yang disesuaikan dengan usia dan *platform* media sosial, contohnya penggunaan media sosial Tik Tok untuk usia remaja, penggunaan media sosial Instagram untuk usia produktif, penggunaan media sosial Facebook untuk ibu rumah tangga dan lainnya.
 - Melakukan perbaikan layanan *contact center* HALO BPOM, baik dalam hal kecepatan merespon maupun informasi yang disampaikan.

2. Peningkatan Indeks Kesadaran Masyarakat

Peningkatan indeks kesadaran masyarakat dilakukan dengan mengintensifkan

kegiatan rutin pemberdayaan masyarakat melalui program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dengan prioritas daerah yang memiliki kesadaran yang masih rendah. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya:

- a. **Meningkatkan strategi komunikasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan KIE**
 - Memfokuskan tujuan KIE BPOM serta menentukan tema materi/pesan yang akan disampaikan secara terpusat dan dilaksanakan “serentak” dengan menyusun desain standar promosi kesehatan atau pedoman yang mengatur terkait pelaksanaan KIE di seluruh Indonesia.
- b. **Meningkatkan sinergi dengan Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*) masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan**

Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan kolaborasi program bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, seperti pengawasan keamanan pangan khususnya untuk pangan industri rumah tangga.

c. **Meningkatkan kerjasama melalui kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.**

BPOM perlu menjalin kerjasama kemitraan dengan melibatkan berbagai unsur, seperti pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, akademisi, media serta mengajak partisipasi aktif masyarakat dalam upaya memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat itu aman untuk dikonsumsi.

d. **Mengembangkan program KIE yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing**

e. **Menyusun konten/materi informasi dan edukasi tentang produk Obat dan Makanan yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat.**

Pesan utama yang perlu disampaikan untuk **meningkatkan literasi masyarakat** terkait pengenalan logo obat, petunjuk penyimpanan produk, nomor izin edar, tanggal kedaluwarsa, ciri-ciri dan efek samping produk yang mengandung bahan berbahaya khususnya pada obat tradisional dan pangan olahan terutama pada masyarakat di wilayah rural.

f. Melakukan upaya persuasif yang menyentuh sisi emosi dan dekat dengan gaya hidup, kepercayaan, budaya, bahasa maupun nilai-nilai yang dianut masyarakat untuk **membentuk sikap yang lebih positif** mengenai pentingnya memperhatikan petunjuk penyimpanan produk yang benar dan membeli produk dengan kemasan yang masih baik/bagus. Upaya persuasif dapat dilakukan melalui penggunaan bahasa daerah dalam penyampaian materi KIE dan lebih interaktif.

g. **Mendorong terciptanya perilaku yang lebih baik** terkait kebiasaan untuk membaca petunjuk penyimpanan produk sesuai dengan informasi yang tertera pada label, membaca informasi pada

label/kemasan sebelum menggunakan, dan membeli/menggunakan produk yang terdaftar di BPOM.

SASARAN KEGIATAN 3

“Meningkatnya sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan”.

Pengukuran kinerja dari Sasaran Kegiatan 3 (SK3) didasarkan pada penilaian terhadap 3 (tiga) indikator kinerja yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Mamuju. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3 tahun 2021 disajikan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 3.8 Sasaran Kegiatan 3

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi 2021			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
			Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK3.1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	91.10	91.10	-	-	93.40	102.52	102.52	BAIK
IKSK3.2 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	74.00	74.00	-	-	61.50	83.11	83.11	CUKUP
IKSK3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	86.75	86.75	-	-	69.49	80.10	80.10	CUKUP
SK3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju						88.58	88.58	CUKUP

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Persentase capaian Indikator Kinerja pada SK3 triwulan IV tahun 2021 berkisar antara 80.10-102.52% dengan capaian SK 3 sebesar 88.58% termasuk dalam kriteria cukup. Capaian ini dikarenakan belum tercapainya target 2 indikator pendukungnya yaitu indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju dan indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

Berikut akan diuraikan analisa capaian dari setiap Indikator Kinerja SK3.

IKU 6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervise yang mencakup sosialisasi/ seminar, workshop/ pelatihan/ bimbingan teknis, asistensi/ pendampingan/ *coaching clinic*, konsultasi, *focus group discussion* (FGD). Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan.

Aspek pengukuran dalam survei ini adalah:

1. Aspek bimbingan dan pembinaan
2. Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan
3. Aspek penanganan saran dan masukan
4. Aspek manfaat
5. Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan
6. Aspek pengetahuan dan pemahaman.

Cara perhitungan indikator ini sebagai berikut.

- a. Dilakukannya survei yang dilakukan secara *online* dan *paper based*, yaitu dengan melakukan *e-mail blast* kepada seluruh pelaku usaha yang pernah mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh BPOM serta *e-mail blast* kepada semua pelaku usaha yang terdaftar di BPOM. Selain itu survei juga dilakukan pada setiap kegiatan bimbingan atau pembinaan yang dilakukan pada tahun berjalan.

- b. Target sampel dihitung dengan rumus Krejcie & Morgan dengan *margin of error* sebesar 2%.
- c. Analisis dilakukan secara statistic-kuantitatif dengan persamaan regresi dan AHP sebagai penimbang.
- d. Kriteria yang digunakan adalah
 - 75,01 – 100 : sangat puas
 - 50,01 – 75 : puas
 - 25,01 – 50 : kurang puas
 - 0 – 25 : tidak puas

Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3.1

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi 2021			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
			Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK3.1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	91.10	91.10	-	-	93.40	102.52	102.52	BAIK

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Persentase capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan diatas triwulan IV tahun 2021 sebesar 102.52% termasuk kriteria baik. Adapun hal-hal yang menunjang keberhasilan capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja balai POM di Mamuju, yaitu adanya pendampingan oleh fasilitator yang dibentuk oleh Balai POM di Mamuju yang memberikan pemahaman kepada pelaku usaha terkait Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)serta mekanisme registrasi produk di Badan POM. Berikut ini tabel detail capaian indeks.

Tabel 3.9 Detail Capaian Indeks IKSK 3.1

No	Unit Penyelenggara KBP	Jml KBP	Respon den	Capaian Indeks	Target	Persen Capaian	Gap Indeks	Total skor
18	BPOM di Mamuju	5	38	93.4	91.1	102.5%	2.3	8

Sumber : Laporan PRKOM BPOM 2021, 2022

Keterangan Skor dan Kategori:

Skor 1 = Jml KBP = 3 atau Jml responden = 30 atau Gap = -1.5

Skor 2 = Jml KBP 4-6 atau Jml responden 31 sd 100 atau Gap -1.4 sd -0.1

Skor 3 = Jml KBP 7-9 atau Jml responden 101 sd 1000 atau Gap 0 sd 1.5

Skor 4 = Jml KBP = 10 atau Jml responden > 1000 atau Gap > 1.5

Kategori A = skor 10-12 (warna hijau)

Kategori B = skor 7-9 (warna kuning)

Kategori C = skor 3-6 (warna merah)

Berdasarkan tabel diatas, Balai POM di Mamuju melaksanakan KBP sebanyak 5 (lima kali) dengan jumlah responden sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang di tahun 2021. Tindak lanjut yang telah dilakukan untuk mendukung capaian yaitu membentuk fasilitator pendamping yang memberikan pendampingan kepada pelaku usaha. Tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut yaitu akan tetap melanjutkan program pembentukan fasilitator pendamping UMKM serta memberi ruang konsultasi kepada pelaku usaha terkait pemenuhan aspek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Sedangkan berdasarkan hasil pengukuran indeks tahun 2021 terdapat beberapa rekomendasi yang diberikan untuk penyelenggaraan KBP (Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan) dan pengukuran indeks tahun 2022 adalah:

- Unit penyelenggara KBP meningkatkan kualitas penyelenggaraan bimbingan dan pembinaan terutama yang dilakukan secara *online* dalam bentuk kegiatan bimtek dan sosialisasi.
- Bentuk upaya peningkatan kualitas dapat dilakukan dengan mencermati dan menindaklanjuti masukan dan keluhan dari para pelaku usaha yang ada pada data saran/masukan,

diantaranya terkait dengan kemudahan memperoleh informasi kegiatan, jumlah peserta, media yang digunakan, kesiapan panitia, respon petugas/narsum atas pertanyaan pelaku usaha, kecukupan waktu, mekanisme antrian untuk konsultasi dan sebagainya

- Penyelenggara KBP menambah kecukupan waktu bimbingan dan pembinaan karena ini merupakan hal yang paling dikeluhkan oleh pelaku usaha
- Unit penyelenggara KBP agar meningkatkan kualitas perencanaan KBP dan melakukan monev KBP berkala dalam upaya pencapaian target indeks masing-masing unit
- Unit penyelenggara KBP menghitung jumlah sampel untuk memenuhi keterwakilan dan penghitungan difasilitasi pada aplikasi
- PIC unit agar meningkatkan *awareness* dan melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait di unit kerja masing-masing sehingga pelaksanaan pengukuran indeks dapat lebih baik dan mengeliminasi kekeliruan penginputan data kegiatan
- Membuat konten video materi bimbingan dan pembinaan untuk disebarluaskan melalui media yang mudah diakses oleh pelaku usaha seperti *youtube* dan lain-lain.
- Penyelenggara KBP menambah sumber daya bagi kegiatan bimbingan dan pembinaan sebagai bentuk komitmen terhadap salah satu kebijakan BPOM yaitu peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha.

IKU 7. Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan

dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM. Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan emphaty.

Untuk mengukur indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu

1. Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*).
2. Indikator tidak langsung yaitu sejauh manakerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*realibility*), tindakan (*responsiveness*) , memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*emphaty*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3.2

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
			2021					
			Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK3.2 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	74.00	74.00	-	-	61.50	83.11	83.11	CUKUP

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Persentase capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan diatas triwulan IV tahun 2021 sebesar 83.11% termasuk kriteria cukup.

Berikut ini Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan BPOM Per Aspek.

Tabel 3.10 Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan BPOM Per Aspek

No.	Provinsi	Realibility	Responsiveness	Assurance	Emphaty
30	Sulawesi Barat	61,51	62,39	61,08	61,01

Sumber : Laporan PRKOM BPOM 2021, 2022

Jika dilihat dari tabel diatas, rata-rata Aspek yang paling tinggi adalah aspek *responsiveness* (tindakan atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat) yaitu contohnya dengan melakukan penarikan produk tanpa izin edar dan kedaluwarsa. Sedangkan aspek yang perlu untuk ditingkatkan adalah aspek *emphaty* yaitu kepuasan atas perhatian BPOM terhadap jaminan keamanan produk yang beredar di masyarakat dan aspek *assurance* yaitu kepuasan atas kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya (*assurance*).

Saran dan masukan untuk meningkatkan nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan BPOM melalui kegiatan *public relation* dan publikasi (liputan media massa) berbagai aktivitas BPOM yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti razia obat dan makanan yang kedaluwarsa, tidak memiliki izin edar dan produk ilegal. Pesan/tema utama yang disampaikan adalah BPOM melindungi masyarakat.

IKU 8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada

aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Tabel 3.10 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3.3

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi 2021			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	86.75	86.75	-	-	69.49	80.10	80.10	CUKUP

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Persentase capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan diatas triwulan IV tahun 2021 sebesar 80.10% termasuk kriteria cukup. Berikut ini rekomendasi untuk meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan BPOM yaitu:

- Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan BPOM melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang berbagai layanan yang disediakan BPOM seperti Halo BPOM, *website* dan media sosial BPOM (facebook, instagram, youtube). Pesan/tema utama yang

- disampaikan adalah terkait sumber layanan informasi tentang keamanan Obat dan Makanan di BPOM.
- b. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat yang masih rendah pada tiga provinsi yaitu Provinsi Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Barat.
 - c. Upaya komunikasi yang perlu dilakukan adalah peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang langkah-langkah pengawasan dan tindakan yang dilakukan oleh BPOM, juga perlu disertai dengan pemberian informasi tentang dampak kinerja pengawasan tersebut secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat. Sementara itu untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan BPOM yang bisa diakses secara langsung, maka informasi tentang berbagai layanan yang disediakan BPOM bagi masyarakat perlu dilakukan dengan lebih gencar dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi yang banyak diakses masyarakat setempat maupun melalui tokoh masyarakat.
 - d. Meningkatkan informasi terkait keamanan vaksin melalui berbagai media, terutama melalui iklan di media cetak dan elektronik (seperti: televisi dan surat kabar).
 - e. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan antibiotik yang rasional serta ancaman bahaya *antimicrobial resistance* (AMR).
 - f. Menginformasikan berbagai layanan yang disediakan BPOM (seperti Halo BPOM, website dan media sosial BPOM) melalui kegiatan KIE dan berbagai media komunikasi yang banyak diakses masyarakat maupun melalui tokoh masyarakat.

SASARAN KEGIATAN 4

“Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju”.

Pengukuran kinerja dari Sasaran Kegiatan 4 (SK4) didasarkan pada penilaian terhadap 6 (enam) indikator kinerja yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Mamuju. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4 tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.11 Sasaran Kegiatan 4

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi 2021			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
			Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK4.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	100.00	100.00	-	-	100.00	100.00	100.00	BAIK
IKSK4.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	64.00	64.00	-	-	51.40	80.31	80.31	CUKUP
IKSK4.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	82.00	82.00	4.00	4.00	100.00	121.95	121.95	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
IKSK4.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	60.00	60.00	15.00	26.00	57.69	96.15	96.15	BAIK
IKSK4.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	60.00	60.00	75.00	129.00	58.14	96.90	96.90	BAIK
IKSK4.6 Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju	3.75	3.75	-	-	4.35	116.00	116.00	SANGAT BAIK
SK4 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Mamuju						101.89	101.89	BAIK

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Pada Sasaran Kegiatan 4 Balai POM di Mamuju mencakup kegiatan pengawasan baik sarana distribusi maupun sarana produksi yang berada di wilayah kerja Provinsi Sulawesi Barat. Untuk fasilitas sarana distribusi yang dilakukan pemeriksaan adalah fasilitas pelayanan kefarmasian maupun fasilitas penyaluran sediaan farmasi serta fasilitas distribusi produk makanan,

sedangkan untuk sarana produksi yang menjadi target pengawasan adalah industri pangan MD serta industri pangan IRTP.

Untuk mencapai SK 4 maka disusun 6 indikator berikut.

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
6. Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju

Berikut diuraikan analisa capaian dari setiap Indikator Kinerja SK4.

IKU 9. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Sedangkan yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan adalah

keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat/ UPT atau lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT.

Indikator kinerja “Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan” dihitung berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan =

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Total rekomendasi yang diterbitkan atau diterima oleh UPT}} \times 100\%$$

Tabel 3.12 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4.1

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
			2021					
			Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK4.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	100.00	100.00	-	-	100.00	100.00	100.00	BAIK

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi sampai dengan triwulan IV sebesar 100% dengan capaian 100% termasuk dalam kriteria baik. Adapun hal-hal yang menunjang keberhasilan capaian persentase Obat yang memenuhi syarat ini, yaitu tingkat kepatuhan petugas dalam membuat rekomendasi tindak lanjut setelah melakukan tugas pengawasan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan. Tindak lanjut yang telah dilakukan yaitu: melakukan evaluasi terhadap rekomendasi tindak lanjut yang telah dibuat Tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut yaitu: akan rutin melakukan monitoring terhadap rekomendasi tindak lanjut yang dibuat oleh petugas.

IKU 10. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Pemangku kepentingan yang dimaksud dalam hal ini adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain: pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Tindak lanjut yang dimaksud adalah *feedback/respon* dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Indikator kinerja “Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh *Stakeholder*” dihitung berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Stakeholder =

$$\left\{ \frac{\text{Jumlah tindak lanjut dari lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diterbitkan kepada lintas sektor}} + \frac{\text{Jumlah tindak lanjut dari pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diterbitkan kepada pelaku usaha}} \right\} \times 100\%$$

Tabel 3.12 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4.2

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi 2021			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
			Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK4.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	64.00	64.00	-	-	51.40	80.31	80.31	CUKUP

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi sampai dengan triwulan IV sebesar 51.40% dengan capaian 80.31% termasuk dalam kriteria cukup. Adapun hambatan dalam pencapaian indikator ini yaitu:

- Adanya reconfusing anggaran yang dilakukan oleh lintas sektor sehingga tidak dapat melaksanakan tindak lanjut berupa peninjauan kembali sarana yang dilakukan pemeriksaan oleh petugas, sedangkan pelaku usaha masih memiliki kesadaran yang rendah untuk melakukan perbaikan terhadap temuan yang telah disampaikan oleh petugas.
- Masih banyak *stakeholder* yang masih belum mampu melakukan perbaikan terkait temuan sarana ketika petugas dari BPOM Mamuju melaksanakan pemeriksaan di sarana karena pada umumnya yang menjadi temuan merupakan temuan terkait pengadaan suatu alat atau perbaikan fisik.
- Masih rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil pengawasan dari BPOM

Program yang menyebabkan rendahnya pencapaian kinerja yaitu aplikasi SMART BPOM yang masih belum termanfaatkan dengan optimal oleh pemerintah daerah.

Tindak lanjut yang telah dilakukan yaitu: Telah mengirimkan surat permintaan tindak lanjut hasil temuan serta melakukan komunikasi melalui telepon maupun melalui aplikasi Whatsapp kepada lintas sektor dan pelaku usaha.

Tindak lanjut yang akan dilaksanakan yaitu melakukan komunikasi kepada lintas sektor dan pelaku usaha terkait temuan ketidaksesuaian selama pengawasan serta lebih intens mengingatkan kepada lintas sektor dan pelaku usaha untuk melakukan perbaikan.

IKU 11. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

Keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah keputusan sertifikasi yang dikeluarkan tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

- a. Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
- b. Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
- c. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
- d. Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK
- e. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
- f. Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat keterangan Ekspor (SKE).

Indikator kinerja “Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu” dihitung berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut.

Persentase Keputusan Penyelesaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

=

$$\frac{\text{keputusan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan dan carry over tahun sebelumnya yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah permohonan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Tabel 3.12 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4.3

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
			2021					
			Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK4.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	82.00	82.00	4.00	4.00	100.00	121.95	121.95	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi sampai dengan triwulan IV sebesar 100% dengan capaian 121.95% termasuk dalam kriteria tidak dapat disimpulkan. Adapun hal-hal yang menunjang keberhasilan capaian persentase Obat yang memenuhi syarat ini, yaitu Pelaku usaha yang telah diberikan pendampingan oleh fasilitator UMKM yang dibentuk oleh Balai POM di Mamuju telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi PSB yang selanjutnya dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk melaksanakan pendaftaran/registrasi produk.

Tindak lanjut sebelumnya yang telah dilakukan yaitu Melaksanakan Bimbingan teknis untuk fasilitator dan program pendampingan UMKM oleh fasilitator dalam mendukung peningkatan pemahaman dan komitmen pelaku usaha dalam melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan dalam rangka melakukan registrasi produk serta melaksanakan kegiatan bimtek e-registrasi pangan olahan yang telah dilaksanakan pada bulan Oktober 2021

Rencana Tindak Lanjut yang akan dilakukan yaitu Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaporan hasil pendampingan yang dilakukan oleh fasilitator UMKM pangan

IKU 12. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Indikator kinerja “Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan” dihitung berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut.

Persentase Sarana Produksi OMKA yang MK

$$= \frac{\text{Jumlah Sarana produksi OMKA yang memenuhi ketentuan}}{\text{Target jumlah sarana produksi OMKA yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko}} \times 100\%$$

Tabel 3.13 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4.4

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi 2021			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
			Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK4.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	60.00	60.00	15.00	26.00	57.69	96.15	96.15	BAIK

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi sampai dengan triwulan IV sebesar 57.69% dengan capaian 96.15% termasuk dalam kriteria baik. Meskipun capaiannya baik dalam pelaksanaan pencapaian indikator masih memiliki beberapa hambatan yaitu masih sedikit pelaku usaha yang dilakukan pemeriksaan memiliki kesadaran untuk memenuhi aspek cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB).

Selain itu, jumlah industri pangan MD yang diawasi di wilayah Sulawesi Barat masih sangat sedikit sedangkan jumlah sarana IRTP sangat banyak (kebanyakan sarana yang tidak memenuhi ketentuan adalah sarana IRTP).

Tindak lanjut yang telah dilakukan yaitu Melaksanakan pengawasan sarana produksi secara intens serta mengingatkan pelaku usaha untuk memenuhi aspek cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB).

Rencana Tindak Lanjut yang akan dilakukan yaitu Melaksanakan pengawasan sarana produksi secara intens kepada pelaku usaha IRTP untuk memenuhi aspek cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) serta membangun komunikasi kepada dinas terkait (Dinas Kesehatan Kabupaten) sebagai penerbit izin edar IRTP agar intens memberikan pembinaan pelaku usaha IRTP.

IKU 13. Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan

Indikator kinerja “Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan” dihitung berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut.

Persentase Sarana Distribusi Obat yang MK

$$= \frac{\text{Jumlah Sarana Distribusi Obat yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana distribusi yang diperiksa}} \times 100\%$$

Tabel 3.14 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4.5

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi 2021			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
			Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK4.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	60.00	60.00	75.00	129.00	58.14	96.90	96.90	BAIK

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi sampai dengan triwulan IV sebesar 58.14% dengan capaian 96.90% termasuk dalam kriteria baik. Adapun faktor pendukung keberhasilan capaian diatas yaitu tingkat kepatuhan lintas sektor

dan pelaku usaha sarana distribusi obat dan makanan dalam rangka pemenuhan persyaratan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terkait dalam pencapaian indikator ini sampai saat ini masih ada hambatan yang dialami yaitu terdapat sarana yang menjadi cakupan pengawasan dimana sarana yang bersangkutan terletak di daerah yang akses jalannya cukup sulit untuk dilalui sehingga menjadi potret bahwa masih cukup banyak sarana yang belum memahami persyaratan terkait pengelolaan obat di sarana distribusi atau sarana pelayanan kefarmasian.

Tindak lanjut yang telah dilakukan yaitu melakukan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan berdasarkan analisis resiko.

Rencana Tindak Lanjut yang akan dilakukan yaitu akan rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian realisasi pengawasan

IKU 14. Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- a. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- b. Profesionalitas SDM (18%);
- c. Sarana Prasarana (15%);
- d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
- e. Konsultasi dan Pengaduan (15%);
- f. Inovasi (7%).

Tabel 3.15 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4.6

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan	
			2021						
			Pembilang	Penyebut	Realisasi				
IKSK4.6	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju	3.75	3.75	-	-	4.35	116.00	116.00	SANGAT BAIK

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Realisasi capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan diatas sampai dengan triwulan IV tahun 2021 sebesar 4.85 dengan capaian sebesar 116%. Berikut ini nilai detail IPP per Aspek.

Tabel

No	Unit Pelayanan Publik	IPP Tahun 2020	Rincian Hasil IPP Tahun 2021						Target IPP Tahun 2021	Selisih Nilai	
			Aspek I Kebijakan	Aspek II SDM	Aspek III Sarana Prasarana	Aspek IV Sistem Informasi	Aspek V Konsultasi	Aspek VI Inovasi			
26	Balai POM di Mamuju	3,49	4,78	4,36	4,61	4,68	4,76	0,28	4,95	3,75	0,60

Sumber: Hasil Penilaian IPP BPOM, 2022

Jika dilihat dari Tabel diatas, nilai aspek tertinggi yaitu aspek kebijakan dengan nilai sebesar 4,78 dan terendah yaitu Aspek VI inovasi sebesar 0.28 sehingga masih perlu peningkatan untuk aspek inovasi. Capaian ini perlu ditingkan di tahun-tahun berikutnya agar masyarakat lebih puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh BPOM di Mamuju.

SASARAN KEGIATAN 5

“Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan”.

Pengukuran kinerja dari Sasaran Kegiatan 5 (SK5) didasarkan pada penilaian terhadap 4 (empat) indikator kinerja yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Mamuju. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 5 tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.16 Sasaran Kegiatan 5

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan	
			2021						
			Pembilang	Penyebut	Realisasi				
IKSK5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	89.50	89.50	-	-	95.93	107.18	107.18	BAIK
IKSK5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	40.00	40.00	-	-	40.00	100.00	100.00	BAIK
IKSK5.3	Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	12.00	12.00	-	-	12.00	100.00	100.00	BAIK
IKSK5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	2.00	2.00	-	-	2.00	100.00	100.00	BAIK
SK5 Meningkatkan efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju							101.80	101.80	BAIK

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran kegiatan 5 “Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan” yang terdiri dari 4 indikator kinerja memiliki rata-rata kriteria capaian target tahunan cukup disebabkan adanya adanya realisasi pada masing-masing indikator kinerja yang masih rendah. Namun ada 1 capaian indikator yang mencapai kriteria baik yaitu yaitu jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya di wilayah kerja Balai POM di Mamuju.

Berikut diuraikan analisa capaian dari setiap Indikator Kinerja SK5.

IKU 15. Tingkat KIE Obat dan Makanan Yang Efektif di Masing Masing Wilayah Kerja Balai POM di Mamuju

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: (a) KIE melalui media cetak dan elektronik; (b)KIE langsung ke masyarakat;

dan (c) KIE melalui media sosial. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria yaitu:

- Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online survey*. Capaian indikator ini berasal dari hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro HDSP BPOM RI.

Indikator kinerja “Tingkat KIE Obat dan Makanan Yang Efektif di Masing Masing Wilayah Kerja Balai POM di Mamuju” dihitung berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut.

Persentase KIE Obat dan Makanan yang efektif =

$$\frac{\text{Jumlah responden yang meningkat pemahamannya}}{\text{Total responden}} \times 100\%$$

Tabel 3.17 Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 5.1

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
			2021					
			Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK5.1 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	89.50	89.50	-	-	95.93	107.18	107.18	BAIK

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Berdasarkan tabel diatas, Target Efektivitas KIE Obat dan Makanan TW IV di wilayah kerja Balai POM di Mamuju sebesar

89.50 dengan realisasi sebesar 107.18 yang diperoleh dari 224 responden dan mendapatkan kategori “Baik”

Adapun hal-hal yang menunjang keberhasilan capaian Target Efektivitas KIE Obat dan Makanan, yaitu walaupun dalam kondisi Pandemi Covid-19, Balai POM di Mamuju tetap gencar melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui KIE baik secara langsung ataupun melalui media (media cetak, elektronik dan media sosial) dengan tetap disiplin memberlakukan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19. Selain itu kegiatan KIE juga dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat secara aktif melalui diskusi, tanya jawab, serta kuis interaktif sehingga masyarakat lebih mudah memahami materi yang disampaikan.

Adanya Pemberlakuan Pembatasan Aktivitas Masyarakat (PPKM) sebagai dampak Pandemi Covid-19 tidak membatasi pelaksanaan KIE, namun Balai POM di Mamuju meakukan beberapa strategi diantaranya yaitu lebih meningkatkan pelaksanaan KIE melalui media elektronik baik berupa webinar via zoom meeting, talkshow media online, podcast bersama lintas sektor, ataupun penyebaran informasi melalui media cetak serta memanfaatkan berbagai kanal media sosial dalam mengedukasi dan memberikan informasi Obat dan Makanan terkini setiap harinya.

IKU 16. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Sekolah dengan PJAS Aman adalah sekolah yang mendapatkan Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah (PBKPKS). Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA. Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan

pangan terhadap kader cilik keamanan pangan dari kelompok siswa dan fasilitator keamanan pangan dari kelompok guru. Selain itu akan dilakukan pengawalan/pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut aman melalui program Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah (PBKPKS) dan juga kegiatan sampling PJAS di kantin dan pedagang sekitar sekolah sebelum dan sesudah intervensi dilakukan. Tujuan dari intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki kemandirian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya di kantin sekolah.

Capaian Indikator kinerja “Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman” dihitung berdasarkan jumlah sekolah yang mendapatkan Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah (PBKPKS). Berikut ini gambar yang menunjukkan capaian indikator kinerja tahun 2021.

Tabel 3.18 Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 5.2

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi 2021			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
			Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK5.2 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	40.00	40.00	-	-	40.00	100.00	100.00	BAIK

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Berdasarkan tabel diatas, pada TW IV kriteria capaian target untuk Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju mendapatkan kategori “Baik” dengan realisasi sebesar 100.00.

Adapun hal-hal yang menunjang keberhasilan capaian di atas, yaitu adanya kerjasama yang baik antara Tim Balai POM di

Mamuju dengan Kader Keamanan PJAS Sekolah yang menjadi lokus intervensi serta adanya dukungan dari lintas sektor terkait (Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas Pendidikan provinsi Sulawesi Barat dan Kantor Wilayah kementerian Agama Kabupaten yang menjadi lokus intervensi PJAS, sehingga pada TW IV Balai POM di Mamuju telah menyelesaikan keseluruhan Monitoring Kegiatan Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah dan Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman yang dibuktikan dengan pemberian Sertifikat PJAS Aman terhadap 40 (empat puluh) sekolah/madrasah yang menjadi target intervensi Tahun 2021 (16 sekolah/madrasah di Kabupaten Mamasa dan 24 sekolah/madrasah di Kabupaten Majene)

Tindak lanjut yang telah dilakukan yaitu Balai POM di Mamuju telah membina hubungan yang baik dengan pihak sekolah/madrasah lokus intervensi PJAS Tahun 2021 dengan melibatkan pihak sekolah terhadap kegiatan yang diadakan oleh Balai ataupun BPOM RI pusat serta tetap memberikan edukasi dan informasi terupdate terkait Obat dan Makanan melalui WhatsApp group.

Tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut yaitu Balai POM di Mamuju akan tetap melakukan pemantauan dan koordinasi yang baik terhadap pihak sekolah/madrasah serta melakukan pengawalan pelaksanaan rencana aksi PJAS aman yang telah diusungkan oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah (KPS) dari masing-masing sekolah/madrasah penerima Sertifikat PJAS Aman.

IKU 17. Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator kinerja ketiga dalam pencapaian Sasaran Kegiatan keenam adalah “Jumlah desa pangan aman” dengan target

sebanyak 1 desa. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM $> 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki kriteria berikut.

- 1) Kader keamanan pangan desa yang aktif
- 2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
- 3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain.

Adapun tahapan dan bobot Indikator Desa Pangan Aman sebagai berikut.

Tabel 3.19 Tahapan dan bobot Indikator Desa Pangan Aman

	Kegiatan	Pembobotan Progres (%)
1	Adokasi Kelembagaan Desa	20
2	Pengadaan gimmick, rapid test kit dll	5
3	Pengawalan	10
4	Pelatihan Kader Keamanan Pangan	15
5	Bimtek Komunitas	15
6	Fasilitasi Keamanan Pangan	10
7	Intensifikasi Pengawasan Keamanan	10
8	Monitoring dan Evaluasi (pertemuan	10
9	Lomba Desa Pangan Aman	5

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Tabel 3.20 Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 5.3

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
			2021					
			Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK5.3 Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	12.00	12.00	-	-	12.00	100.00	100.00	BAIK

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Berdasarkan tabel diatas, realisasi jumlah Desa Pangan Aman pada TW IV sebesar 100.00 dengan Kriteria capaian “Baik”

Adapun hal-hal yang menunjang keberhasilan capaian jumlah desa pangan aman ini, yaitu adanya kerjasama yang baik antara Balai POM di Mamuju dengan pihak pemerintah Kabupaten Majene dan Pihak Desa yang menjadi lokus intervensi Tahun 2021. Selain itu Tim Kader Keamanan Pangan Desa (TKPD) sangat antusias dan kooperatif dalam pelaksanaan setiap tahapan kegiatan Desa Pangan Aman sehingga di penghujung Tahun 2021 tepatnya tanggal 30 November Balai POM di Mamuju telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu bersama pihak desa yang menjadi lokus intervensi, Pemerintah Kabupaten Majene serta beberapa pihak terkait lainnya.

Tindak lanjut yang telah dilakukan sebagai apresiasi atas keberhasilan program Desa Pangan Aman maka di bulan Desember 2021 tim Balai POM bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Majene mengusulkan Desa Buttu Baruga sebagai nominator untuk diikutkan dalam Lomba Desa Pangan Aman Tahun 2021 dan terhadap desa yang belum diikutkan tetap dilakukan pembinaan.

Tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut yaitu tetap melakukan pengawalan terhadap program Desa PAMAN yang sementara dan yang akan dijalankan oleh TKPD masing-masing desa. Balai POM di Mamuju akan tetap menjalin komunikasi yang baik serta tetap

memberikan KIE terkait Obat dan Makanan yang aman melalui media komunikasi Whatsapp Group.

IKU 18. Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Indikator jumlah pasar aman dari bahan berbahaya dengan target sebanyak 2 pasar. Pasar adalah pasar tradisional yang diusulkan oleh daerah sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar aman dari bahan berbahaya. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan pedoman implementasi program pasar aman dari bahan berbahaya dalam rangka mencapai pasar aman dari bahan berbahaya.

Pasar aman dari bahan berbahaya adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait untuk mengendalikan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar aman dari bahan berbahaya, serta pelatihan fasilitator pasar aman dari bahan berbahaya.

Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya dan rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Kriteria Pasar Aman meliputi :

1. Mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya
2. Terjadi penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta
3. Mempunyai rencana program pengawalan pada tahun berikutnya

Adapun tahapan dan bobot Indikator Desa Pangan Aman sebagai berikut.

Tabel 3.21 Tahapan dan bobot Indikator Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Kegiatan		Pembobotan Progres (%)
1	Adokasi	20
2	Survey Pasar	5
3	Bimtek Pengelola Pasar + Materi pelatihan Fasilitator	15
4	Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1 Pasar	20
5	Penyuluhan	5
6	Kampanye	5
7	Monev Tahap 2 (Sampling dan Pengujian) Pasar	20
8	Lomba Pasar Aman	10
Total		100

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Tabel 3.21 Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 5.4

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi 2021			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
			Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK5.4 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	2.00	2.00	-	-	2.00	100.00	100.00	BAIK

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Jumlah Pasar aman dari Bahan Berhaya pada TW IV sebesar 100.00 dengan Kriteria capaian “Baik”

Adapun hal-hal yang menunjang keberhasilan capaian Jumlah Pasar aman dari Bahan Berhaya ini, yaitu kerjasama yang baik dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Majene serta Kepala Pasar Sentral Majene dan Tim Pengawas Pasar. Petugas pasar yang telah mendapatkan pelatihan untuk sampling dan pengujian telah kompeten untuk melakukan kegiatan mandiri dalam melakukan pengawasan di pasar yang dikelolanya.

Tindak lanjut yang telah dilakukan yaitu dengan memberikan apresiasi kepada pihak pasar atas keberhasilan program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dengan mengusulkan Pasar Sentral Majene tersebut sebagai nominator PPABK Tahun 2021.

Tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut yaitu tetap melakukan pengawalan terhadap peredaran pangan di pasar serta memantau petugas pasar agar tetap aktif melakukan pengawasan mandiri di pasar yang dikelolanya. Balai POM di Mamuju juga akan tetap memberikan edukasi terkait Obat dan Makanan aman baik melalui WhatsApp group ataupun diberikan langsung dalam bentuk bahan edukasi (berupa poster atau buku)

SASARAN KEGIATAN 6

“Meningkatnya pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju yang optimal”.

Pengukuran kinerja dari Sasaran Kegiatan 6 (SK7) didasarkan pada penilaian terhadap 2 (dua) indikator kinerja yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Mamuju.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 6 tahun 2021 disajikan dalam berikut.

Tabel 3.22 Capaian Sasaran Kegiatan 6

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
			2021					
			Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK6.1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	100.00	100.00	-	-	100.00	100.00	100.00	BAIK
IKSK6.2 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	100.00	100.00	-	-	100.00	100.00	100.00	BAIK
SK6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju						100.00	100.00	BAIK

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Berdasarkan tabel diatas, capaian atas SK6 berkisar antara 100.00% dengan kriteria baik. Hal ini karena jumlah sampel telah selesai diuji dan diperiksa sesuai dengan perencanaan.

Berikut dijelaskan analisis setiap indikatornya.

IKU 19. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju

Indikator sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{A+B}{2}$$

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Obat}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Obat}} \times 100\%$$

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling tahun 2021. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Tabel 3.22 Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 6.1

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
			2021					
			Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK6.1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	100.00	100.00	-	-	100.00	100.00	100.00	BAIK

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi sampai dengan triwulan IV sebesar 100% termasuk dalam kriteria baik. Meskipun capaiannya baik, sebenarnya dalam pelaksanaan masih memiliki hambatan sebagai berikut.

- Keterbatasan reagen pengujian karena sedang menunggu pengadaan reagen paket ke-2 di triwulan IV
- Keterbatasan alat sehingga ada beberapa parameter yang tidak dapat dilakukan pengujiannya
- Renovasi gedung laboratorium yang masih berjalan hingga akhir tahun
- Jadwal rencana pelaksanaan sampling mundur akibat gempa
Adapun tindak lanjut sebelumnya yang telah dilakukan untuk mendukung pengujian sampel sebagai berikut.
- Telah dibentuk Tim Perencanaan Kebutuhan Reagen dan Kebutuhan Alat Laboratorium yang membantu dalam menentukan skala prioritas

- Telah dilakukan pembagian jadwal pengujian sampel Covid-19 per dua bulan
- Telah dilakukan percepatan pengadaan reagen
- Telah melakukan koordinasi dengan petugas sampling dan tim penerima sampel untuk dapat dilakukan sampling tepat waktu
Tindak lanjut kedepannya yang akan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan capaian tersebut sebagai berikut.
 - Percepatan pengadaan reagen dan peralatan penunjang untuk pengujian
 - Terus mengawal dalam melakukan pengawasan penandaan produk makanan yang beredar
 - Terus melakukan koordinasi dengan petugas sampling dan tim penerima sampel untuk dapat dilakukan sampling tepat waktu
 - Melakukan monitoring sampel untuk sampel yang belum memenuhi syara baik dari evaluasi penandaan maupun pengujian

IKU 20. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju

Indikator persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung dengan rumus berikut.

$$\text{Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{A+B}{2}$$

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Makanan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Makanan}} \times 100\%$$

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa

meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Tabel 3.23 Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 6.2

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
			2021					
			Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK6.2 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	100.00	100.00	-	-	100.00	100.00	100.00	BAIK

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi sampai dengan triwulan IV sebesar 100% termasuk dalam kriteria baik. Meskipun capaiannya baik, sebenarnya dalam pelaksanaan masih memiliki hambatan sebagai berikut.

- Keterbatasan reagen pengujian karena sedang menunggu pengadaan reagen paket ke-2 di triwulan IV
 - Keterbatasan alat sehingga ada beberapa parameter yang tidak dapat dilakukan pengujiannya
 - Renovasi gedung laboratorium yang masih berjalan hingga akhir tahun
 - Jadwal rencana pelaksanaan sampling mundur akibat gempa
- Adapun tindak lanjut sebelumnya yang telah dilakukan untuk mendukung pengujian sampel sebagai berikut.
- Telah dibentuk Tim Perencanaan Kebutuhan Reagen dan Kebutuhan Alat Laboratorium yang membantu dalam menentukan skala prioritas
 - Telah dilakukan pembagian jadwal pengujian sampel Covid-19 per dua bulan
 - Telah dilakukan percepatan pengadaan reagen

- Telah melakukan koordinasi dengan petugas sampling dan tim penerima sampel untuk dapat dilakukan sampling tepat waktu
Tindak lanjut kedepannya yang akan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan capaian tersebut sebagai berikut.
- Percepatan pengadaan reagen dan peralatan penunjang untuk pengujian
- Terus mengawal dalam melakukan pengawasan penandaan produk makanan yang beredar
- Terus melakukan koordinasi dengan petugas sampling dan tim penerima sampel untuk dapat dilakukan sampling tepat waktu
- Melakukan monitoring sampel untuk sampel yang belum memenuhi syara baik dari evaluasi penandaan maupun pengujian

SASARAN KEGIATAN 7

“Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju”.

Pengukuran kinerja dari Sasaran Kegiatan 7 (SK7) didasarkan pada penilaian terhadap 1 (satu) indikator kinerja yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Mamuju.

Penindakan yang dimaksud adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)

2. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
3. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
4. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara *carry over* tahun n-1. Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

1. SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
2. Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
3. P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
4. Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

Adapun capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 7 triwulan I tahun 2021 disajikan dalam tabel dibawah ini.

IKU 21. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

Tabel 3.24 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 7

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
			2021					
			Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK7.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	97.00	97.00	-	-	125.00	128.87	128.87	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
SK7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju						128.87	128.87	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

- Keterbatasan reagen pengujian karena sedang menunggu pengadaan reagen paket ke-2 di triwulan IV
- Keterbatasan alat sehingga ada beberapa parameter yang tidak dapat dilakukan pengujiannya
- Renovasi gedung laboratorium yang masih berjalan hingga akhir tahun
- Jadwal rencana pelaksanaan sampling mundur akibat gempa
Adapun tindak lanjut sebelumnya yang telah dilakukan untuk mendukung pengujian sampel sebagai berikut.
- Telah dibentuk Tim Perencanaan Kebutuhan Reagen dan Kebutuhan Alat Laboratorium yang membantu dalam menentukan skala prioritas
- Telah dilakukan pembagian jadwal pengujian sampel Covid-19 per dua bulan
- Telah dilakukan percepatan pengadaan reagen
- Telah melakukan koordinasi dengan petugas sampling dan tim penerima sampel untuk dapat dilakukan sampling tepat waktu
Tindak lanjut kedepannya yang akan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan capaian tersebut sebagai berikut.
- Percepatan pengadaan reagen dan peralatan penunjang untuk pengujian
- Terus mengawal dalam melakukan pengawasan penandaan produk makanan yang beredar
- Terus melakukan koordinasi dengan petugas sampling dan tim penerima sampel untuk dapat dilakukan sampling tepat waktu
- Melakukan monitoring sampel untuk sampel yang belum memenuhi syara baik dari evaluasi penandaan maupun pengujian

SASARAN KEGIATAN 8

“Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal”

Pengukuran kinerja dari Sasaran Kegiatan 8 (SK8) didasarkan pada penilaian terhadap 2 (dua) indikator kinerja yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Mamuju. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 8 tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.28 Capaian Sasaran Kegiatan 8

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi 2021			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK8.1	Indeks RB Balai POM di Mamuju	64.00	64.00	-	-	64.02	100.03	100.03	BAIK
IKSK8.2	Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	75.40	75.40	-	-	-	Nilai Belum Keluar	Nilai Belum Keluar	-
SK8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal							100.03	100.03	BAIK

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian atas persentase capaian kinerja pada SK8 sebesar 100.03% termasuk kriteria baik. Hasil nilai AKIP akan dikeluarkan oleh dari Inspektur Utama hingga saat ini belum keluar dan realisasi Indeks RB yang diperoleh yaitu sebesar 64.02. Berikut penjelasan terkait masing-masing indikator.

IKU 22. Indeks RB Balai POM di Mamuju

Capaian kinerja berupa indeks RB dinilai berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di

Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

1. Manajemen Perubahan : bobot 5%
2. Penataan Tatalaksana : bobot 5%
3. Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 15%
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10%
5. Penguatan Pengawasan : bobot 15%
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10%

Tabel rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN : bobot 20%.
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat : bobot 20%

Tabel 3.29 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 8.1

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
				2021					
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK8.1	Indeks RB Balai POM di Mamuju	64.00	64.00	-	-	64.02	100.03	100.03	BAIK

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Persentase capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan diatas belum tercapai di triwulan IV sebesar 100,08 termasuk dalam kriteria baik. Adapun hasil evaluasi detail Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) sebagai berikut.

Tabel 3.30 Tabel Hasil Evaluasi PMPZI

PENILAIAN		Nilai	%	Keterangan
A. PROSES (60)				
I.	MANAJEMEN PERUBAHAN (8)	4,65	58,07%	TMS
II.	PENATAAN TATALAKSANA (7)	3,70	52,81%	TMS
III.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (10)	5,90	59,03 %	TMS
IV.	PENGUATAN AKUNTABILITAS (10)	7,60	76,02 %	MS
V.	PENGUATAN PENGAWASAN (15)	7,47	49,83%	TMS
VI.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)	5,10	50,95%	TMS
TOTAL PENGUNGKIT		34,42		TMS
B. HASIL (40)				
PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN		18,01	90%	TMS
I.	1. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15)	13,54	90,25%	MS
	2. Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti (5)	4,47	89,36%	TMS
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		17,30	87%	MS
II.	1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (15)	17,30	86,50%	MS
TOTAL HASIL		35,31		
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI		69,72		

Sumber : Surat Inspektur Utama No. PI.06.06.7.72.12.21.88, 2022

Berdasarkan hasil evaluasi PMPZI menunjukkan bahwa nilai total pada BPOM di Mamuju sebesar 69,72. Namun adanya perbedaan hasil penilaian Tim Penilai Internal (TPI) dengan KemenPANRB untuk penetapan WBK/WBBM yang cukup tinggi maka nilai komponen pengungkit PMPZI dikonversikan dengan rata-rata penilai BB/BPOM oleh KemenPANRB dibagi nilai rata-rata TPI pada tahun 2020. Dari konversi tersebut (0,834) menghasilkan Indeks RB BPOM di Mamuju 64,02. Dengan Hasil survei Persepsi Pelayanan Publik (IPP) sebesar 3,46 (syarat 3,2) dan survei Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebesar 3,61 (syarat 3,6) diatas persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB.

Adapun hasil evaluasi terhadap capaian RB sebagai berikut.

1. Pembangunan ZI dilakukan berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan pimpinan unit kerja, namun belum seluruh target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM
2. Terhadap pelaksanaan rencana kerja belum dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala termasuk terhadap capaian target prioritas. Selain itu belum terdapat tindak lanjut atas rekomendasi
3. Komitmen terhadap perubahan telah dibangun dengan baik oleh seluruh anggota organisasi. Hal ini menunjukkan kontribusi dari *Agent of Change* (AoC) bersama dengan Kepala Balai yang berperan sebagai role model perubahan dan pelaksanaan nilai organisasi
4. Telah mengembangkan inovasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik maupun inovasi yang mendorong efisiensi pengelolaan kinerja dan penguatan integritas, yaitu WaLi (Whatsapp Lincah) dan Biyanka (Mobil Layanan Informasi dan Edukasi Keliling Mamuju)

5. Unit kerja telah melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai dalam rangka meminimalisir kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi. Beberapa hal yang masih perlu perbaikan terkait pelaksanaan Pembangunan ZI sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengawasan internal, dari 47 rekomendasi 42 telah Sesuai Saran (SS) dengan presentase 89,36% dan 5 rekomendasi Belum Sesuai Saran (BSS)
2. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala termasuk terhadap capaian target prioritas. Selain itu belum terdapat tindak lanjut atas rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi
3. Belum terdapat tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
4. Dalam penataan manajemen SDM belum dilakukan monitoring dan evaluasi atas:
 - a. Penempatan pegawai hasil rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja
 - b. Kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
 - c. Hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
5. *Public campaign* pengendalian gratifikasi belum dilakukan secara berkala
6. Dalam penanganan benturan kepentingan belum dilakukan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam fungsi tugas utama, belum terdapat bukti sosialisasi, implementasi dan monitoring evaluasi secara berkala

7. Dalam pemberian pelayanan publik belum menerapkan *reward/punishment* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
8. Secara umum belum dilakukan analisis dampak kemanfaatan inovasi terhadap perbaikan unit kerja.

Berikut ini rekomendasi perbaikan yang dapat disampaikan oleh TPI dalam pelaksanaan Pembangunan ZI sebagai berikut.

1. Melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan Zona Integritas termasuk capaian target prioritas secara berkala serta melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi
3. Menyusun tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penempatan pegawai hasil rekrutmen, mutasi pegawai dan hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
5. Melakukan *public campaign* tentang pengendalian gratifikasi secara berkala
6. Mengoptimalkan penanganan benturan kepentingan dengan melakukan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan kepada seluruh pegawai/fungsi, sosialisasi/internalisasi, implementasi serta monitoring dan evaluasi secara berkala
7. Menerapkan *reward/ punishment* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
8. Terus melakukan pengembangan inovasi baik yang sudah ada maupun inovasi baru, sesuai dengan karakteristik unit kerja

dan kebutuhan *stakeholder* serta melaksanakan analisis dampak kemanfaatan inovasi yang telah dikembangkan terhadap perbaikan unit kerja.

IKU 23. Nilai AKIP Balai POM di Mamuju

Nilai AKIP Balai POM di Mamuju dinilai berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

1. Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek:
 - a. Rencana Strategis (10%) meliputi pemenuhan renstra (2%), kualitas renstra (5%) dan implementasi renstra (3%)
 - b. Perencanaan kinerja tahunan (20%) meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%)
2. Pengukuran Kinerja (25%) meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan pengukuran (5%)
 - b. Kualitas pengukuran (12,5%)
 - c. Implementasi pengukuran (7,5%)
3. Pelaporan Kinerja (15%) meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan pelaporan (3%)
 - b. Kualitas pelaporan (7,5%)

- c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4. Evaluasi Internal (10%) meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan evaluasi (2%)
 - b. Kualitas evaluasi (5%)
 - c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5. Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek:
 - a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%)
 - b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%)
 - c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)

Tabel 3.30 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 8.2

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
				2021					
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK8.2	Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	75.40	75.40	-	-	-	Nilai Belum Keluar	Nilai Belum Keluar	-

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Persentase capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan diatas belum tercapai di Triwulan IV tahun 2021.

SASARAN KEGIATAN 9

“Terwujudnya SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja optimal”

Pengukuran kinerja dari Sasaran Kegiatan 9 (SK9) didasarkan pada penilaian terhadap 1 (satu) indikator kinerja yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Mamuju. Dimana cara penilaiannya ditentukan oleh kriteria berikut:

- a. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
- b. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

c. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
2. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
3. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
4. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 10 triwulan IV tahun 2021 disajikan dalam Tabel dan Gambar berikut.

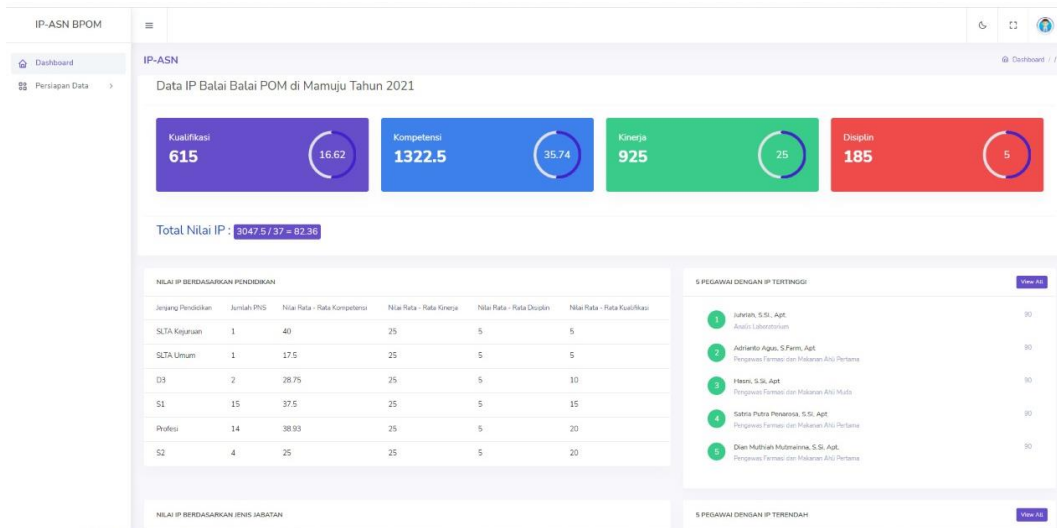
IKU 24. Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju

Tabel 3.31 Capaian Sasaran Kegiatan 9

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi 2021			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
			Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK9.1 Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju	82.00	82.00	-	-	82.36	100.44	100.44	BAIK
SK9 Terwujudnya SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja optimal						100.44	100.44	BAIK

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Indeks Profesional ASN (IP ASN) Balai POM di Mamuju Triwulan IV tahun 2021 sebesar 82.36 dengan capaian sebesar 100.44% termasuk dalam kriteria baik. Berikut ini gambar capaian IP ASN yang diambil dari aplikasi SIASN.



Gambar XX

Sumber: Aplikasi SIASN BPOM Per 13 Januari 2022, 2022

Berdasarkan tabel dan gambar diatas dapat dilihat bahwa nilai IP diurutkan berdasarkan pendidikan. Jenjang pendidikan dengan nilai rata-rata kompetensi tertinggi yaitu profesi apoteker sebesar 38.93 sedangkan nilai rata-rata kompetensi terendah yaitu SLTA Umum sebesar 17.5.

SASARAN KEGIATAN 10

“Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju”.

Pengukuran kinerja dari Sasaran Kegiatan 10 (SK10) didasarkan pada penilaian terhadap 2 (dua) indikator kinerja yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Mamuju.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 10 tahun 2021 disajikan dalam tabelberikut.

Tabel 3.32 Capaian Sasaran Kegiatan 10

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
			2021					
			Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK10.1 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP	53.00	53.00	-	-	51.94	98.00	98.00	BAIK
IKSK10.2 Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal	2.00	2.00	-	-	1.42	71.00	71.00	CUKUP
SK10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju						84.50	84.50	CUKUP

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Capaian dari SK10 pada Triwulan IV sebesar 84.50% dengan kriteria cukup. Hal ini karena indikator indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal tahun 2021 tidak mencapai target.

Berikut ini Analisa atas setiap Indikator Kinerja SK10.

IKU 25. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP

Pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Laboratorium pengujian UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- Standar Ruang Lingkup > 65,
- Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
- Standar Alat Laboratorium > 70

Tabel 3.33 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 10.1

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi 2021			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
			Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK10.1 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP	53.00	53.00	-	-	51.94	98.00	98.00	BAIK

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

No	Bidang/ Laboratorium	Persentase Pemenuhan Standar Ruang Lingkup (%)	Persentase Pemenuhan Standar Kompetensi (%)	Persentase Pemenuhan Standar Peralatan (%)
1	Obat dan Nappza	56.50	68.74	34.99
2	Pangan	45.00		
3	Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	55.08		
4	Kosmetik	36.94		
Rata-rata Kimia		48.38	68.74	34.99
5	Mikrobiologi	52.5	83.21	23.82
Rata-Rata Nilai Pemenuhan (%)		50.44	75.98	29.41
Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium		51.94		

Sumber: Laporan Ringkas Penilaian Kemampuan Laboratorium, 2022

Realisasi capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP sebesar 51.94 dengan persentase capaian sebesar 98% termasuk kriteria baik. Adapun kendala yang menyebabkan belum tercapai dengan optimal sebagai berikut.

1. Tahun Anggaran 2021 Balai POM di Mamuju tidak ada penambahan Alat Instrumen, Alat Gelas, Media dan Suku Cadang, karena anggarannya dialihkan ke Perbaikan gedung Lab. Kimia yang rusak, dan pembangunan kembali gedung lab. Mikrobiologi yang hancur pasca gempa.

2. Keterbatasan peralatan Instrumen, Alat gelas, Suku Cadang juga terdampak pada pemenuhan SRL, misalnya, karena tidak memiliki Vacuum Manifold + SPE, IAC., Microwave, maka pengujian beberapa parameter OT, SK, Kosmetik dan Pangan tidak dapat dilakukan.
3. SDM yang ada, belum sesuai dengan ABK:
 - a. Penguji Kimia: Obat (2 orang), Kosmetik (1 orang), OTSK (1 Orang), Pangan (2 orang)
 - b. Penguji Mikro: 3 orang

Rencana Tindak Lanjut:

1. Pembelian tambahan beberapa Peralatan Instrumen, sesuai Anggaran yang tersedia TA 2022 (Persetujuan RoRenKeu BPOM):
 - a. Penambahan 1 Unit HPLC UV-Vis, untuk pengujian di laboratorium Kimia OM
 - b. 1 Unit Microwave Digestion, untuk kelengkapan pengujian secara AAS, Cemarkan Logam Pb, Cd, Mn pada produk Pangan, OTSK dan Kosmetik
 - c. 1 Unit Alat Destilasi, untuk pengujian Sulfit, Formalin pada Pangan, dan uji Metanol-Etanol pada Pangan, OTSK dan Kosmetik
 - d. 1 Unit Vacuum Manifold + SPE, untuk kelengkapan preparasi PK Simultan Pengawet Benzoat, Sorbat, Paraben pada Pangan dan OTSK, Identifikasi Simultan Hidroklorotiazid, Kofein, Furosemid, Bisakodil, Sibutramin.. pada Sampel OTSK., Identifikasi Famotidin, Simetidin, Ranitidin HCl pada OT dan Identifikasi Antalgin dan Klorfeniramin maleat.

2. Penambahan SRL (Verifikasi Metode Analisa) sesuai peralatan yang tersedia, dan atau ikut pada kegiatan Terpadu bersama PPMOMN.
3. Berpartisipasi pada Uji Profisiensi, Uji Kolaborasi/ Uji Banding dari BPOM Pusat dan Balai/BB POM.

IKU 26. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC
 - Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
 - Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan

Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.

Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:

- UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan

1. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai.
2. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Tabel 3.34 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 10.2

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
			2021					
			Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK10.2 Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal	2.00	2.00	-	-	1.42	71.00	71.00	CUKUP

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan diatas di Triwulan IV tahun 2021 sebesar 1.42 dengan capaian sebesar 71.00%, capaian ini masuk dalam kriteria cukup. Berikut ini detail capaian yang diambil dari Nota Dinas Pusat Data dan Informasi (Pusdatin).

Periode : Triwulan I-IV

No	Nama Balai	Data dan Informasi Mutakhir		Jumlah c = a + b	Pemanfaatan Sistem Informasi				Jumlah h = d+e+f+g/4	Total Nilai i = c + h / 2
		SIPT (a)	SPIMKer (b)		Email (d)	Sharing Folder (e)	Dashboard BOC (f)	Berita Aktual (g)		
		80%	20%							
28	Balai POM di Mamuju	1,6	0	1,6	2	1	2	0	1,25	1,42

Sumber: Nota Dinas Pusdatin Nomor TI.05.8.85.01.22.45, 2022

Dalam pencapaian indikator ini terdapat beberapa hambatan yaitu:

- Belum optimalnya penggunaan berita aktual pada *SUBSITE* Balai POM di Mamuju, penggunaan *SHARING FOLDER* dan *SPIMKER* yang masih sangat kurang karena triwulan I sd III capaiannya 0.

- Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi BPOM – BOC pada Triwulan I berdampak pada tidak optimalnya capaian di triwulannya tidak bisa dimaksimalkan
- Berubah-ubahnya nilai indeks per triwulannya

Tindak lanjut yang telah dilakukan yaitu koordinasi dengan petugas operator dan koordinator-koordinator terkait untuk meningkatkan konsistensi komunikasi melalui *email corporate* dan pemantauan terhadap petugas SPIMKER. lebih intens membuat berita aktual pada subsite Balai POM di Mamuju dan melakukan akses pada *sharing folder*. Selain itu juga telah dilakukan kegiatan Bimtek SIPT yang melibatkan Tim dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BPOM.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu memastikan komponen tiap indikator telah di caccading ke masing-masing Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) penanggungjawab dan koordinasi ke pusdatin terkait SPIMKER dan *SUBSITE*.

SASARAN KEGIATAN 11

“Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel”

Pengukuran kinerja dari Sasaran Kegiatan 11 (SK11) didasarkan pada penilaian terhadap 2 (dua) indikator kinerja yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Mamuju. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 11 tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.35 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 11

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
				2021					
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju	92.50	92.50	-	-	89.40	96.65	96.65	BAIK
IKSK11.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Mamuju	95.00	95.00	-	-	100.00	105.26	105.26	BAIK
SK11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel							100.96	100.96	BAIK

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Persentase capaian kinerja 2 (dua) indikator kinerja pada SK7 triwulan IV tahun 2021 berkisar antara 96.65 s/d 105.26%. Capaian dari SK11 yaitu 100.96% termasuk dalam kriteria baik. Hal ini disebabkan karena salah satu Indikator yaitu Nilai Kinerja Anggaran capaiannya kurang optimal. Berikut ini analisa atas setiap Indikator Kinerja dalam SK11.

IKU 27. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang bersifat flat dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) yang bersifat kumulatif. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA
2. Deviasi Halaman III DIPA
3. Pengelolaan UP
4. Rekon LPJ Bendahara
5. Data Kontrak
6. Penyelesaian Tagihan
7. Penyerapan Anggaran
8. Retur SP2D
9. Perencanaan Kas (Renkas)

10. Pengembalian/Kesalahan SPM
11. Dispensasi Penyampaian SPM
12. Pagu Minus
13. Konfirmasi Capaian Output

Capaian indikator ini dihitung dengan rumus Berikut.

Nilai Kinerja Anggaran BPOM =

$$(\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

Berikut ini gambar yang menunjukkan capaian indikator tahun 2021.

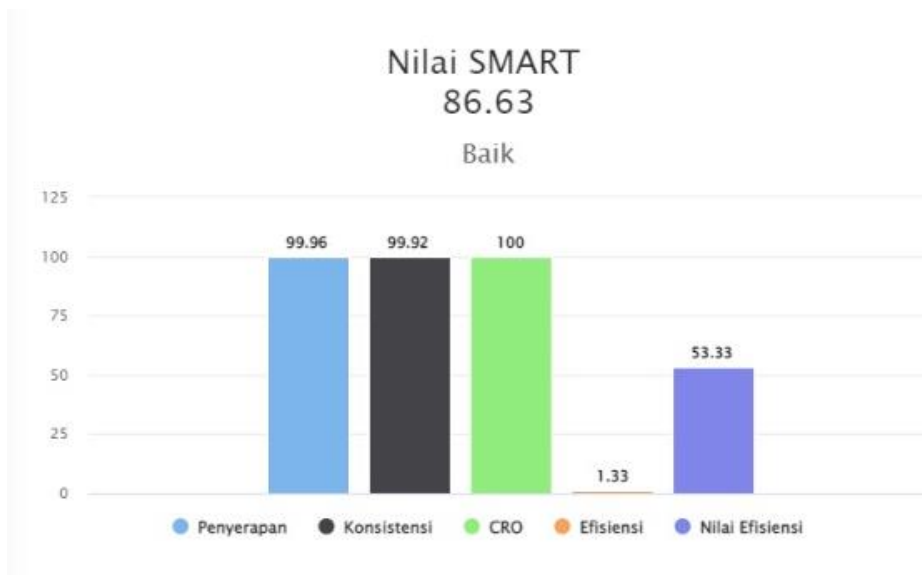
Tabel 3.36 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 11.1

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi 2021			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
			Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK11.1 Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju	92.50	92.50	-	-	89.40	96.65	96.65	BAIK

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju pada Triwulan IV tahun 2021 sebesar 96.65% dengan kriteria baik dan realisasi sebesar 89,40.

Adapun capaian NKA Triwulan IV sebesar 86.63 dengan komponen terendah yaitu nilai efisiensi sebesar 53.33. Hal ini disebabkan karena adanya capaian output yang tidak optimal. Berikut ini merupakan grafik capaian NKA.



Gambar 3.30 Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2021
Sumber: Smart DJA Per 17 Januari 2022

Terkait dengan capaian IKPA Triwulan IV sebesar 93.56 data tersebut diambil pertanggal 17 Januari 2022. Faktor yang menyebabkan belum optimalnya nilai IKPA yaitu karena penyerapan anggaran yang merupakan kumulatif atas nilai diperoleh dari Triwulan I 2021 sebesar 72.41 dan nilai kesalahan SPM sebesar 80.00. Berikut ini merupakan tabel rinci nilai IKPA Triwulan IV.

Tabel 3.37 Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAMUJU

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode Sakler	Unit Sakler	Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konsistensi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total x Konsistensi Bobot)	Nilai EKA (SMART)				
					Revisi DIPA	Deviiasi Halaman III DIPA	Pagu Mulus	Data Kontrak	Pengelolaan LUP dan TUP	LPU Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Capaian Output	Retur SPKD	Rekasas	Kesalahan SPM				Penyerapan Anggaran	Konsistensi	Capaian Kelelahan	Efisiensi	Nilai EKA
1	178	419578	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAMUJU	Nilai	100.00	81.93	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	72.41	100.00	100.00	98.52	0.00	80.00	88.88	95%	93.56	99.96	99.92	100.00	1.33	86.63
			Bobot		5	5	5	10	8	5	5	15	10	17	5	0	5								
			Nilai Akhir		5.00	4.10	5.00	10.00	8.00	5.00	5.00	18.86	10.00	17.00	4.93	0.00	4.00								
			Nilai Aspek			93.98				100.00			92.73			80.00									

Dislaimer: Sesuai PER-4/PB/2021, untuk periode Triwulan I TA 2021 tidak dilakukan penilaian IKPA untuk indikator Deviiasi Halaman III DIPA dan Capaian Output

Sumber : Aplikasi Omspan Per 17 Januari 2022

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan nilai indikator ini yaitu dengan mengadakan pelatihan internal dengan narasumber dari Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Barat dan KPPN Mamuju serta rapat koordinasi pertriwulan dan koordinasi dengan masing-masing penanggung jawab per komponen capaian.

Tindak lanjut yang telah dan akan dilaksanakan secara berkala yaitu melakukan pemantauan terhadap capaian indikator-indikator pembentuk IKPA terutama terkait penyerapan anggaran dan capaian output yang merupakan capaian kumulatif dan bobot tertinggi. Selain itu juga dilaksanakan koordinasi dengan bagian terkait yang menjadi penanggung jawab masing-masing indikator IKPA di Tahun 2022.

IKU 28. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Mamuju

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:

$$\text{IE} = (\% \text{capaian output}) / (\% \text{capaian input})$$

Standar efisiensi (SE) adalah 1.

Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

$$\text{TE} = (\text{IE} - \text{SE}) / \text{SE}$$

Apabila $\text{IE} \geq \text{SE}$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $\text{IE} < \text{SE}$ maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Adapun kriteria yang digunakan sebagai berikut:

1. Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
2. Tidak efisien apabila $\text{TE} < 0$ atau $\text{TE} > 1$

Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

1. 0 - 0,2 : 100% → Efisien
2. 0,21 - 0,4 : 95% → Efisien
3. 0,41 - 0,6 : 92% → Efisien
4. 0,61 - 0,8 : 90% → Efisien
5. 0,81 - 1,0 : 88% → Efisien
6. 1,01 - 1,2 : 86% → Tidak Efisien
7. 1,21 - 1,4 : 84% → Tidak Efisien
8. 1,41 - 1,6 : 80% → Tidak Efisien
9. 1,61 - 1,8 : 78% → Tidak Efisien
10. > 1,81 : 75% → Tidak Efisien

Berikut ini gambar yang menunjukkan capaian indikator tahun 2021.

Tabel 3.38 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 11.2

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi 2021			Capaian Terhadap Target Triwulan	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria Capaian Target Tahunan
			Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK11.2 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Mamuju	95.00	95.00	-	-	100.00	105.26	105.26	BAIK

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa Capaian Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Mamuju pada Triwulan IV tahun 2021 sebesar 105,26%. termasuk kriteria baik dengan realisasi sebesar 100,00 masuk kedalam katagori Efisien. Capaian yang baik ini harus tetap dipertahankan meskipun jika dilihat detail, Balai POM di Mamuju masih memiliki kendala berikut.

1. Gempa Bumi di Sulawesi Barat pada triwulan I dan masih berlangsungnya Pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan perkantoran tidak terlaksana sesuai dengan perencanaan dan

semua kegiatan realokasi untuk renovasi dan rekonstruksi gedung pasca gempa

2. Perubahan total diperencanaan kegiatan dan anggaran menyebabkan output kegiatan ada yang tidak sesuai perencanaan

Sebagai tindaklanjutnya telah dilakukan rapat monitoring kegiatan dan anggaran insidental bulanan dan triwulan, pembentukan tim pembangunan gedung dan monitoring progress pembangunan secara berkala. Selain itu juga telah dilakukan *update* terhadap perencanaan Kegiatan dan Anggaran termasuk kegiatan terpadu dengan menghubungi penanggung jawab kegiatan terkait di pusat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penyerapan anggaran dan capaian kinerja output dapat berjalan selaras dan seimbang. Selain itu juga telah dilakukan revisi POK dan DIPA secara berkala untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang disesuaikan dengan kondisi pasca gempa bumi dan optimalisasi penyerapan anggaran.

3.2 Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Bentuk akuntabilitas keuangan Balai POM di Mamuju Tahun 2021 yaitu melalui penyampaian Laporan Keuangan

berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan ke BPOM RI sebagai Eselon I.

Tabel 3.39 Realisasi Anggaran Per Rincian Output

No.	Kode	Program/Kegiatan/Output	TW IV		
			Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	3165.ADD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	125,095,000	124,964,315	99.90
2	3165.AEA.001	Laporan kegiatan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan oleh BB/BPOM	25,393,000	25,379,156	99.95
3	3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh BB/BPOM	38,178,000	37,999,425	99.53
4	3165.BDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh BB/BPOM	1,095,645,000	1,095,321,770	99.97
5	3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	815,781,000	814,990,972	99.90
6	3165.BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	87,004,000	86,726,028	99.68
7	3165.CAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	-	-	0.00
8	3165.CAB.002	Layanan Sarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	79,964,000	79,459,300	99.37
9	3165.CAB.003	Layanan Prasarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	8,738,246,000	8,738,228,456	100.00
10	3165.QCD.U73	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM MAMUJU	151,512,000	150,359,489	99.24
11	3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	630,719,000	630,248,701	99.93
12	3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	618,501,000	617,140,045	99.78
13	3165.QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya	69,308,000	68,921,379	99.44
14	3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	76,971,000	76,260,783	99.08

No.	Kode	Program/Kegiatan/Output	TW IV		
			Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)
15	3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/BPOM	274,710,000	274,642,982	99.98
16	3165.QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh BB/BPOM	22,277,000	22,219,248	99.74
17	3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	43,440,000	43,421,701	99.96
18	3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	311,766,000	311,464,673	99.90
19	6384.EAA.004	Layanan Perkantoran UPT	6,065,073,000	6,064,429,660	99.99
Jumlah			19,269,583,000	19,262,178,083.00	99.96

Sumber: Monev Anggaran, 2021

Berikut ini merupakan tabel realisasi anggaran per indikator kinerja.

Tabel 3.40 Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator Kinerja	Anggaran per Sasaran Strategis		
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	109,440,715	109,399,705.67	99.96
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di	43,527,715	43,272,306.00	99.41

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator Kinerja	Anggaran per Sasaran Strategis		
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)
	syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	wilayah kerja Balai POM di Mamuju			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	109,440,714	109,399,705.67	99.96
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	43,527,714	43,272,306.00	99.41
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	22,277,000	22,219,248.00	99.74
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap	295,662,250	295,511,949.50	99.95

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator Kinerja	Anggaran per Sasaran Strategis		
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)
	terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju			
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	39,983,500	39,865,703.45	99.71
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	86,629,500	86,550,508.45	99.91
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang	273,911,250	273,830,442.50	99.97

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator Kinerja	Anggaran per Sasaran Strategis		
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)
	Balai POM di Mamuju	dilaksanakn di wilayah kerja Balai POM di Mamuju			
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	96,174,000	96,050,364.70	99.87
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	96,174,000	96,050,364.70	99.87
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	9,544,500	9,499,856.25	99.53
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan	Persentase sarana distribusi	8,688,000	8,684,340.20	99.96

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator Kinerja	Anggaran per Sasaran Strategis		
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)
	sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju			
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju	77,941,500	77,866,168.25	99.90
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	295,662,250	295,511,949.50	99.95
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	295,662,250	295,511,949.50	99.95
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Jumlah desa pangan aman di	630,719,000	630,248,701.00	99.93

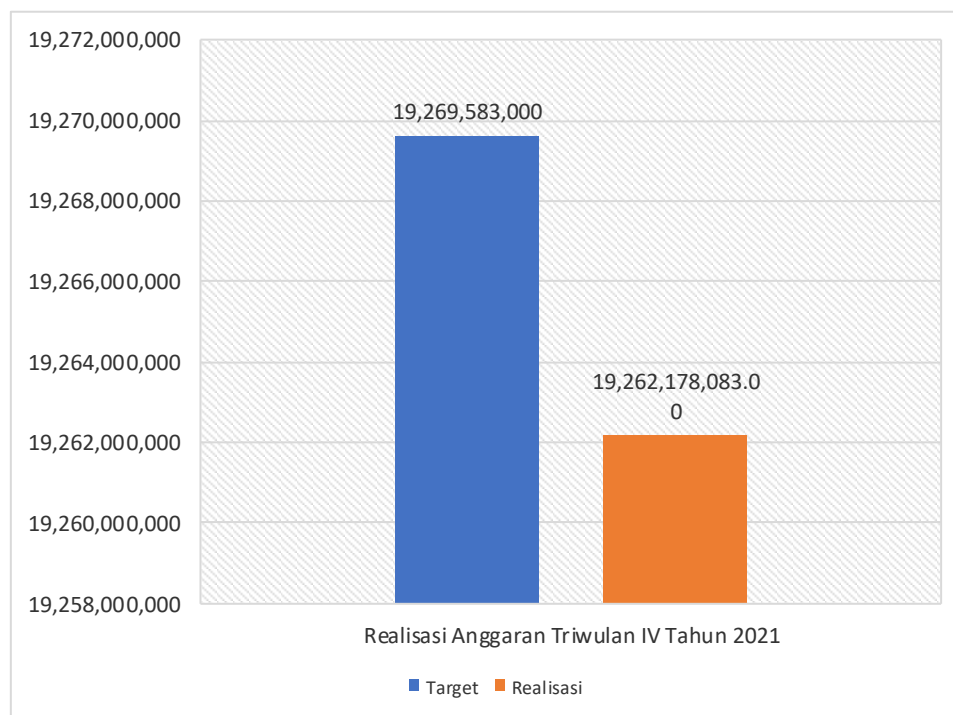
No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator Kinerja	Anggaran per Sasaran Strategis		
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)
	informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	wilayah kerja Balai POM di Mamuju			
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	618,501,000	617,140,045.00	99.78
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	69,308,000	68,921,379.00	99.44
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	109,440,714	109,399,705.67	99.96
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan	43,527,714	43,272,306.00	99.41

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator Kinerja	Anggaran per Sasaran Strategis		
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)
	wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju			
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal	Indeks RB Balai POM di Mamuju	176,905,000	175,738,645.00	99.34
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal	Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	8,818,210,000	8,817,687,756.00	99.99
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju	407,890,500	407,495,486.00	99.90
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP	407,890,500	407,495,486.00	99.90
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal	17,870,714	17,852,045.00	99.90

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator Kinerja	Anggaran per Sasaran Strategis		
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju	2,021,691,000	2,021,476,553.33	99.99
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Mamuju	2,021,691,000	2,021,476,553.33	99.99
TOTAL			19,269,583,000	19,262,178,083.00	99.96

Sumber: Monev Anggaran, 2021

Berikut ini grafik total realisasi anggaran Triwulan IV Tahun 2021



Gambar 3.31 Realisasi Anggaran Tahun 2021

Sumber : Monev Anggaran 2021 Disusun oleh Penyusun, 2022

Pagu anggaran yang tercantum dalam dokumen DIPA Balai POM di Mamuju 2021 Revisi Anggaran Triwulan IV sebesar Rp19,269,583,000 Realisasi Anggaran Triwulan IV tahun 2021 sebesar Rp19,262,178,083.00 atau 99.96%. Adapun Realisasi Anggaran Per Belanja sebagai berikut.

Tabel 3.41 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAMUJU

PAGU DAN REALISASI BELANJA

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja									Total		
					Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain	Transfer			
1	063-419578	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAMUJU	178	PAGU	4,342,713,000	6,108,660,000	8,818,210,000	0	0	0	0	0	0	0	19,269,583,000	
				REALISASI	4,342,225,355	6,102,264,972	8,817,687,756	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	19,262,178,083	
				PERSENTASE	(99.99%)	(99.90%)	(99.99%)									(99.96%)
				SISA	487,645	6,395,028	522,244	0	0	0	0	0	0	0	7,404,917	
TOTAL				PAGU	4,342,713,000	6,108,660,000	8,818,210,000	0	0	0	0	0	0	19,269,583,000		
				REALISASI	4,342,225,355	6,102,264,972	8,817,687,756	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19,262,178,083		
				PERSENTASE	(99.99%)	(99.90%)	(99.99%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(99.96%)		
				SISA	487,645	6,395,028	522,244	0	0	0	0	0	0	7,404,917		

Sumber: Aplikasi Omspan 17 Januari 2022

Balai POM di Mamuju telah berupaya mengelola anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan pengelolaan dan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan Balai POM di Mamuju dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi anggaran beserta pemenuhan kegiatan secara berkala bulanan dan rapat triwulanan (melakukan reviu terhadap POK)
- Revisi anggaran dan kegiatan secara berkala untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan
- Revisi anggaran dan kegiatan secara berkala untuk optimalisasi anggaran kegiatan yang sudah tercapai
- Melakukan revisi POK dan DIPA terkait dengan renovasi gedung laboratorium yang rusak akibat gempa bumi
- Telah buatnya sistem pengawasan anggaran internal Balai POM di Mamuju secara *online* dengan Nama “Sangapa (Sistem Pengawasan Anggaran Balai POM di Mamuju)”. Link ini bisa diakses oleh masing-masing koordinator kelompok substansi sehingga bias memonitoring serapan anggarannya masing-masing
- Telah dilakukan peningkatan kompetensi staf di masing-masing kelompok substansi terkait pengetahuan mengenai siklus perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi BPOM dengan narasumber dari Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM RI.

Faktor penyebab belum optimalnya realisasi anggaran pada indikator IKPA antara lain:

- Adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan perubahan metode dan konsep pelaksanaan kegiatan
- Adanya pembangunan gedung pasca gempa yang belum selesai karena mengalami kendala berupa terbatasnya ketersediaan material dan peralatan serta cuaca di Mamuju yang tidak menentu
- Adanya kegiatan Prioritas Nasional yang pelaksanaannya bertahap belum selesai dilaksanakan

- Adanya penyerapan triwulan yang tidak sesuai dengan target Kementerian Keuangan

Agar realisasi anggaran lebih optimal perlu dilakukan beberapa perbaikan sebagai berikut :

- Melakukan rapat rutin dengan tim percepatan pembangunan gedung untuk memastikan pembangunan diselesaikan tepat waktu sehingga penyerapan anggaran sesuai dengan perencanaan.
- Melakukan update rencana pelaksanaan kegiatan dan disesuaikan dengan masih adanya Pandemi Covid-19
- Melakukan pemantauan setiap rutin dan segera melakukan revisi / realokasi anggaran jika kegiatan tidak akan dilaksanakan.
- Mereviu kembali kegiatan terpadu yang tidak terlaksana karena adanya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di Wilayah Jawa dan Bali agar dialihkan ke kegiatan lain
- Peningkatan kompetensi SDM secara berkala termasuk yang ada diberbagai substansi kelompok terkait penyerapan anggaran dan kegiatan untuk menyelaraskan realisasi kegiatan dan anggaran
- Secara konsisten melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi kegiatan dan anggaran dimasing-masing kelompok substansi melalui *google sheet* yang telah disediakan
- Proses realisasi anggaran dilakukan sesuai perencanaan yang terbaru agar tidak menumpuk di akhir tahun

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Balai POM di Mamuju sebagai salah satu instansi pemerintah memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja. Sejak tahun 2020 Balai POM di Mamuju sudah menyusun Laporan Kinerja Interim sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai POM di Mamuju kepada Kepala BPOM RI secara Triwulanan, disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja juga merupakan upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Pada tahun 2021, Balai POM di Mamuju memiliki tantangan yang cukup besar yaitu adanya Gempa Bumi tanggal 15 Januari 2021 dengan kekuatan 6,2 Magnitudo dan pandemi covid-19 yang masih berlangsung. Keadaan ini menyebabkan perubahan yang signifikan dalam proses pelaksanaan kegiatan Balai POM di Mamuju dan kebijakan-kebijakan Daerah dan Nasional yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Gempa Bumi tersebut berdampak cukup signifikan karena ada kerusakan talud dan 3 (tiga) gedung laboratorium Balai POM di Mamuju. Namun adanya kejadian tersebut tidak menurunkan semangat kerja seluruh Balai POM di Mamuju untuk mencapai kinerja yang optimal. Peristiwa gempa bumi tersebut diubah menjadi sebuah kekuatan untuk dapat menjadi lebih kompak dan semangat untuk memberikan bantuan kepada masyarakat di Sulawesi Barat yang lebih terdampak.

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 Balai POM di Mamuju telah berhasil mencapai Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Total sebesar 102.34% dengan kriteria BAIK. Selain itu ada 8 (delapan) Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan dengan kriteria BAIK yaitu:

- SK1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
- SK2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
- SK4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
- SK5 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
- SK6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
- SK8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal
- SK9 Terwujudnya SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja optimal
- SK11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel

Hal ini sesuai dengan misi Balai POM di Mamuju yaitu:

- Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
- Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.

- Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Terkait dengan anggaran, total anggaran DIPA Revisi Anggaran Triwulan IV Rp19,269,583,000 dengan Realisasi Anggaran Triwulan IV tahun 2021 sebesar Rp19,262,178,083.00 atau 99.96%.

Demi meningkatkan capaian kinerja, Balai POM di Mamuju terus berupaya melakukan perbaikan secara berkesinambungan, dengan peningkatan kinerja dan kompetensi SDM serta pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai.

4.2 Saran

Sebagai bentuk upaya untuk memperbaiki capaian kinerja Balai POM di Mamuju perlu dilakukan beberapa upaya antara lain

1. Secara aktif melakukan inovasi-inovasi terkini agar tetap bekerja efektif dan efisien
2. Perlu dilakukan kaji ulang terhadap strategi maupun target pencapaian indikator kinerja secara berkala melalui rapat internal triwulanan
3. Mereviu kembali kegiatan terpadu yang tidak terlaksana dan koordinasi dengan BPOM Pusat karena pandemi Covid-19 masih berlangsung
4. Dilakukan perencanaan kembali belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal yang disesuaikan dengan kondisi saat ini
5. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya Balai POM di Mamuju baik dari segi SDM, penganggaran dan infrastruktur

6. Meningkatkan cakupan pengawasan dengan meningkatkan koordinasi lintas sektor terkait baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten yang ada di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
7. Meningkatkan pelayanan publik Balai POM di Mamuju dengan melakukan perbaikan sistem pelayanan registrasi untuk efisiensi layanan publik
8. Meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan baik untuk *premarket evaluation* maupun *postmarket surveilan*

LAMPIRAN

1. Target Kinerja Jangka Menengah Balai POM di Mamuju Tahun 2020-2024 (Reviu Renstra)

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA (SEMULA)					REALISASI 2020	TARGET KINERJA (MENJADI)				
					2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
<i>Stakeholders Perspective</i>	SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	IKSK 1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	80.8	83.6	86.6	90	92.3	79.90	80.8	83.6	86.6	90	92.3
			IKSK 1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	78	80	82	84	86	84.31	78	84	86	88	90
			IKSK 1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	80	82	84	86	88	85.00	80	85	87	88	90
			IKSK 1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	78	80	82	84	86	74.07	78	80	82	84	86
			IKSK 1.5	Persentase pangan fortifikasi yang	-	-	-	-	-	-	-	88	89	90	90

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN IV 2021 BALAI POM DI MAMUJU

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA (SEMULA)					REALISASI 2020	TARGET KINERJA (MENJADI)				
					2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
				memenuhi syarat											
	SK2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	IKSK 2.1	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	69	73	76	79	83	64.86	69	68	71	75	78
	SK3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	IKSK 3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	83	84.5	86	87.5	89	95.08	83	91.1	92.3	93.4	94.6
			IKSK 3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	71	74	77	80	83	72.00	71	74	76.01	78.01	80.01

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA (SEMULA)					REALISASI	TARGET KINERJA (MENJADI)				
					2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
			IKSK 3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	85	86.75	88.5	91	92	82.92	85	86.75	88.5	91	92
<i>Internal Process Perspective</i>	SK4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	IKSK 4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	78	80	82	84	86	96.43	78	100	100	100	100
			IKSK 4.2	Persentase keputusan/rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	52.6	60.7	68.8	76.9	85	66.23	52.6	64	71	78	85
			IKSK 4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	80	82	84	86	88	20.00	80	82	84	86	88
			IKSK 4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi	50	55	60	65	70	85.00	50	60	65	70	75



PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA (SEMULA)					REALISASI 2020	TARGET KINERJA (MENJADI)				
					2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
				ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju											
			IKSK 4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	51	53	55	58	60	86.87	51	60	65	70	75
			IKSK 4.6	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju	3.11	3.46	3.81	4.16	4.51	3.49	3.11	3.75	4.01	4.25	4.51
			IKSK 4.7	Persentase UMKM yang memenuhi standar	-	-	-	-	-	-	-	-	53.33	55.56	61.11
	SK5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	IKSK 5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	72	75	78	81	85	96.10	77.63	89.5	91.3	93.1	95
			IKSK 5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	20	40	60	82	102	13.69	16	40	54	68	82

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN IV 2021 BALAI POM DI MAMUJU

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA (SEMULA)					REALISASI 2020	TARGET KINERJA (MENJADI)				
					2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
			IKSK 5.3	Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	6	12	18	25	31	5.00	5	12	18	25	31
			IKSK 5.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	1	2	3	4	5	1.00	1	2	3	4	5
	SK6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	IKSK 6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	82	85	88	91	94	100.00	82	100	100	100	100
			IKSK 6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	75	77	80	83	85	100.00	75	100	100	100	100
	SK7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai	IKSK 7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	44	49	55	60	65	150.00	44	97	98	99	100



PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA (SEMULA)					REALISASI 2020	TARGET KINERJA (MENJADI)				
					2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
		POM di Mamuju													
<i>Learning and Growth Perspective</i>	SK8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal	IKSK 8.1	Indeks RB Balai POM di Mamuju	85	89	93	94	95	61.05	85	64	65	66	67
			IKSK 8.2	Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	80	84	89	91	92	73.37	80	75.4	77.4	79.4	81.4
	SK9	Terwujudnya SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja optimal	IKSK 9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju	75	77	80	82	85	82.94	75	82	82.5	83	83.5
	SK10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju	IKSK 10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP	70	75	80	85	90	45.00	70	53	58	63	68
			IKSK 10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal	1.51	2	2.26	2.5	3	1.70	1.51	2	2.25	2.5	3
SK11	Terkelolanya Keuangan	IKSK	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM	93	94	95	96	97	86.66	93	92.5	93.1	94.3	95.5	



PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA (SEMULA)					REALISASI	TARGET KINERJA (MENJADI)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2020	2021	2022	2023	2024
		Balai POM di Mamuju secara Akuntabel	11.1	di Mamuju											
			IKSK 11.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Mamuju	Efisien (90%)	Efisien (92%)	Efisien (94%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (100%)	Efisien (90%)	Efisien (95%)	-	-	-

Sumber: Reviu Renstra 2020-2024, 2022

1. Rencana Kerja Tahunan 2021 (Perubahan)



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU

Jl. Poros Mamuju - Kalukku, KM.13 Bombo, Kab. Mamuju - Sulawesi Barat, Telp. (0426) 2322759

Email : bpommamuju@gmail.com , ulpkmamuju@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BALAI

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU

NOMOR HK.02.02.33A.12.21.2780 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI MAMUJU

NOMOR HK.04.03.122.05.20.909 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KINERJA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU
TAHUN 2021

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju Nomor HK.04.03.122.05.20.909 Tahun 2020 tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju Tahun 2021, perlu disesuaikan dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dan Keputusan Kepala Balai POM di Mamuju Nomor HK.02.02.33A.12.21.2777 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Balai POM di Mamuju Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju Nomor HK.02.02.33A.11.21.2467 Tahun 2021 tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju Tahun 2021;



BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU

Jl. Poros Mamuju - Kalukku, KM.13 Bambu, Kab. Mamuju - Sulawesi Barat, Telp. (0426) 2322759

Email : bpommamuju@gmail.com , ulpkmamuju@gmail.com

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU

Jl. Poros Mamuju - Kolukku, KM.13 Bambu, Keb. Mamuju - Sulawesi Barat, Telp. (0426) 2322739
Email : bpommamuju@gmail.com , ulokmamuju@gmail.com

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU TENTANG RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU TAHUN 2021.
- Kesatu** : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju Tahun 2021 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU

Jl. Paras Mamuju - Kalukku, KM.13 Bambu, Kab. Mamuju - Sulawesi Barat, Telp. (0426) 2322759
Email : bpommamuju@gmail.com , ulpkmamuju@gmail.com

- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2021.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 08 November 2021.

Ditetapkan di Mamuju

pada tanggal 17 Desember 2021

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
MAMUJU

Lintang Purba Jaya



BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU

Jl. Poros Mamuju - Kalukku, KM.13 Bambu, Kab. Mamuju - Sulawesi Barat, Telp. (0426) 2322759
Email : bpommamuju@gmail.com , uipkmamuju@gmail.com

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU

NOMOR HK.02.02.33A.11.21.2790 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU NOMOR
HK.04.03.122.03.20.909 TAHUN 2020 TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI MAMUJU TAHUN 2021

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU TAHUN 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Semula	Menjadi
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	83,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	84
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82	85
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	80
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-	88
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	73	68



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU

Jl. Foros Mamuju - Kalukku, KM.13 Bambu, Kab. Mamuju - Sulawesi Barat, Telp. (0426) 232275P

Email : bpamamuju@gmail.com , ulpkmamuju@gmail.com

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Semula	Menjadi
	Mamuju			
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	84.5	91.1
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	74	74
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Mamuju	86,75	86,75
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	80	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60.7	64
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	82	82
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	60
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	53	60





BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU

Jl. Poros Mamuju - Kalukku, KM.13 Baribu, Kab. Mamuju - Sulawesi Barat, Telp. (0426) 232275P

Email : bpommamuju@gmail.com , ulpkmamuju@gmail.com

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Semula	Menjadi
		Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju	3.46	3.75
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	79.18	89.5
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40	40
		Jumlah desa pangan aman	12	12
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2	2
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	77	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	49	97
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal	Indeks RB Balai POM di Mamuju	89	64
		Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	84	75.4
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju	77	82



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU

Jl. Poros Mamuju - Kalukku, KM.13 Bombe, Kab. Mamuju - Sulawesi Barat, Telp. (0426) 2322759


Email : bapcmamuju@gmail.com , ulpkmamuju@gmail.com

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Semula	Menjadi
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	75	53
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal	2	2
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju	94	92.5
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Mamuju	Efisien (92%)	Efisien (95%)

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI MAMUJU

Lintang Purba Jaya

2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 (Lama)



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU
 Jl. Paras Mamuju - Kakukku, KM.13 Bambu, Kab. Mamuju - Sulawesi Barat, Telp. (0426) 2322759
 Email : bpommamuju@gmail.com , ulakmamuju@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:



Nama : Dra. Netty Nurmuliawaty, Apt., M.Kes
 Jabatan : Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju
 selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
 Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
 selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, 22 Desember 2020

<p>Pihak Kedua</p>  <p>Dr. Penny K. Lukito, MCP</p>	<p>Pihak Pertama</p>  <p>Dra. Netty Nurmuliawaty, Apt., M.Kes</p>
--	---

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	73
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	84,5
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	74
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Mamuju	86,75
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana	Persentase keputusan/rekomendasi hasil	80

3. RAPK Tahun 2021



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BPOM di Mamuju
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat			83,6			83,6			83,6	83,6	83,6	83,6	125.547.500,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat			80			80			80	80	80	84	76.651.440,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan			82			82			82	82	82	85	99.902.800,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan			80			80			80	80	80		23.178.830,00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat												88	22.277.000,00
6.	Indeks kesedaran masyarakat (Awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												68	252.503.200,00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												91,1	262.189.700,00
8.	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												74	231.896.200,00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM												86,75	233.923.000,00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan			80			80			80	80	80	100	45.717.450,00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan			80,7			80,7			80,7	80,7	80,7	84	36.481.450,00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu			82			82			82	82	82	82	38.178.000,00

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN IV 2021 BALAI POM DI MAMUJU

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi Ketersediaan			55			55			55	55	55	40	21.720.000,00
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi kelengkapan			53			53			53	53	53	60	77.310.500,00
15.	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja LPT BPOM												3,75	36.630.500,00
16.	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan			79,18			79,18			79,18	79,18	79,18	89,5	236.093.000,00
17.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman			20			50			80	80	80	40	219.717.000,00
18.	Jumlah desa pangan aman			20			50			80	80	80	12	429.431.000,00
19.	Jumlah pasar berbasis komunitas			20			50			80	80	80	2	100.112.000,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar			21,33			51,87			71,18	71,18	71,18	100	99.782.800,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar			21,33			49,33			66,67	66,67	66,67	100	37.763.830,00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan			20			30			40	40	40	97	187.575.000,00
23.	Indeks RB LPT												64	529.002.020,00
24.	Nilai AKIP LPT												75,4	79.122.630,00
25.	Indeks Profesionalitas ASN LPT												82	38.774.500,00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												53	3.000.463.800,00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi LPT yang optimal			2			2			2	2	2	2	421.050.000,00
28.	Nilai Kinerja Anggaran LPT			25			50			75	75	75	92,5	6.502.560.430,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	
25.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT			92			92			92	92	92	95	5.853.327.420,00
Total													19.269.583.000,00	

Mamuju, 08 November 2021

Kepala Balai POM di Mamuju



Lintang Purba Jaya, S.Farm.,Apt.,M.Si




REFORMASI BIROKASI **BALAI POM DI MAMUJU**

Menuju Zona Integritas WBK/WBBM berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan standart yang ditetapkan, apabila tidak siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Petugas Balai POM di Mamuju **TIDAK** menerima **hadiah/bingkisan** dalam bentuk apapun.

LAPORAN
KINERJA
Interim Triwulan IV
2021
BALAI POM DI MAMUJU

 Jalan Poros Mamuju-Kalukku KM. 13,
Bambu, Sulawesi Barat

 (0426) 2322759

 bpom_mamuju@pom.go.id